

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS KINERJA UPTD (UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS)
PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
DENGAN PENDEKATAN ADMINISTRATIF GOVERNANCE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Silvia Enita

NPM : 177110719

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMNISTRASI PUBLIK**

PEKANBARU

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TUGAS PEMBIMBING

Nama : Silvia Enita
NPM : 177110719
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan
Pendekatan Administratif Governance

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing materi dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pekanbaru, 07 April 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Administrasi Publik

Ketua,

Lilis Suryani, S. Sos., M.Si

Pembimbing,

Kartius, S.Sos., M.AP

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

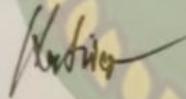
PERSETUJUAN TIM PENGGUJI

Nama : Silvia Enita
NPM : 177110719
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran Dinas Perhubungan Dengan Pendekatan Administratif Governance

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan – ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian konfrehensif fakultas ilmu sosial dan ilmu politikk dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 07 April 2021

Ketua,



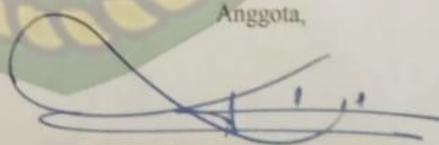
Kartius, S.Sos., M.AP

Sekretaris,



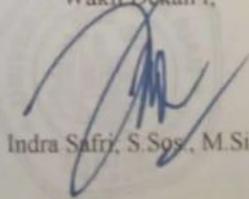
Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Anggota,



Dr.H. Ahmad Tarmizi Yussa, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 345/DIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 17 Maret 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 18 Maret 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa

Nama : Silvia Fuita
NPM : 177110719
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perpajakan Dinas Perhubungan Dalam Mengelola Perpajakan Dikota Pekanbaru
Nilai Ujian : Angka : 82 ; Huruf : A-
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kartius, S.Sos., M.Si	Ketua	1.
2.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2.
3.	Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA	Anggota	3.
4.	Andri Kurniawan, B.PM., M.Si	Notulen	4.

Pekanbaru, 18 Maret 2021
An. Dekan

Indra Safri, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 358/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Angg** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Dasar** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Rekomendasi : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Ditentukan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Silvia Enita
N P M : 177110719
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perpikiran Dinas Perhubungan Dalam Mengelola Perpikiran Dikota Pekanbaru

Struktur Tim :

1. Kartius, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Hendry Andry, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Dr. H. A. Tarmizi Yussa, MA Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 12 Maret 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Ditampilkan Kepada :
Wakil Rektor UIR
dr. Ka. Biro Keuangan UIR
Ketua Prodi
p -----sk penguji-----

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

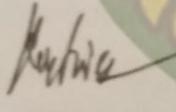
Nama : Nurwa Enita
NPM : 177110719
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas)
Perparkiran Dinas Perhubungan Dengan Pendekatan
Administratif Governance

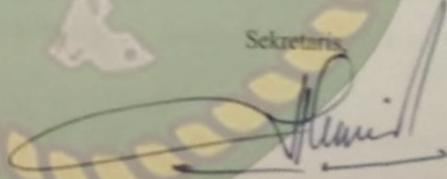
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan tim penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 07 April 2021

An. Tim Penguji

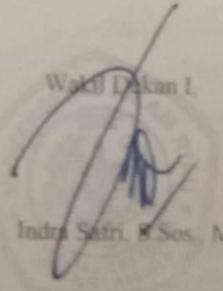
Ketua, Sekretaris

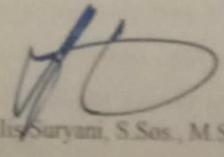

Kartius, S.Sos., M.AP


Hendry Andry, S.Sos., M.Si

Turut menyetujui

Wakil Dekan I, Ketua,
Prodi Administrasi Publik


Indra Safri, S.Sos., M.Si


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

iv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana starata satu.

Penulis dengan keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbadai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.C.L Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku ketua Prodi Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Kartius, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan meberikan ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses pembimbingan berlangsung.

5. Bapak dan ibu dosen ilmu Administrasi Publik yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu yang mana telah memberikan ilmu dan wawasan yang besar sehingga membantu penulis dalam menyusun proposal penelitian ini.
6. Kedua orang tua saya tercinta, kakak-kakak dan adik-adik beserta keluarga dan kerabat penulis yang telah memberikan kasih sayang, semangat, dukungan dan motivasi baik secara moral dan material kepada saya.
7. Semua teman-teman seperjuangan terutama kelas A jurusan Ilmu Administrasi Publik Angkatan 2017 dan Sahabat- sahabat saya Bella Maharani, Irene Oktaviani, Tirani, Rantika Listihara yang selalu memberikan semangat dan kebersamaan.
8. Jafri Aldi Fajri yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik Beliau itu dibalasi dengan rahmat dan karunia yang setimpal amin..

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada para pembacanya.

Pekanbaru, 03 Maret 2021

Penulis,

Silvia Enita

DAFTAR ISI

	Halaman
<u>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</u>	ii
<u>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</u>	iii
<u>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI</u>	iv
<u>PENGESAHAN SKRIPSI</u>	v
<u>KATA PENGANTAR</u>	vi
<u>DAFTAR ISI</u>	vii
<u>DAFTAR TABEL</u>	ix
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	x
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	xi
<u>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</u>	xii
<u>ABSTRAK</u>	xiii
<u>ABSTRACT</u>	xiv
<u>BAB I : PENDAHULUAN</u>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	13
<u>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</u>	
A. Studi Kepustakaan.....	15
1. <u>Konsep Kinerja Organisasi</u>	18
2. <u>Konsep Manajemen Kinerja</u>	21
3. <u>Konsep Good Governance</u>	29
4. Konsep Akuntabilitas.....	33
5. Konsep Transparansi.....	36
6. Konsep Value For Money.....	39
B. Kerangka Pikir.....	41
C. Hipotesis.....	42

D. Konsep Operasional.....43

E. Operasional Variabel.....45

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian..... 46

B. Lokasi penelitian 46

C. Key informasi dan informan..... 47

D. Teknik Penarikan Sampel 48

E. Jenis dan Sumber Data 49

F. Teknik Pengumpulan Data 49

G. Teknik Analisis Data..... 50

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian..... 51

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kota Pekanbaru 53

1. Keadaan Geografis.....53

2. Kependudukan.....54

3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru.....55

B. Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru..... 56

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....56

2. Visi dan Misi Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....56

3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....57

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden 66

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....67

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur.....68

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....69

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan..... 71

1. Perencanaan Kerja.....71

2. Pelaksana Kerja.....82

C. Temuan-Temuan diluar dari variabel-variabel penelitian.....93

BAB VI : PENUTUP

A.Kesimpulan 95

B.Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA..... 99

LAMPIRAN..... 103



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
<u>1.1: Target Dan Realisasi Penerimaan Parkir Kota Pekanbaru</u>	9
<u>1.2: Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum</u>	10
<u>II.2: Operasional Variabel Penelitian Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance</u>	45
<u>III.1 : Key Informan dan Informan Pegawai UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru</u>	47
<u>III.2 : Jumlah Informan Petugas Lapangan</u>	48
<u>III.3: Jadwal Kegiatan Penelitian Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance</u>	51
<u>V.1: Klasifikasi Responden Pegawai UPTD Perparkiran Menurut Jenis Kelamin</u>	67
<u>V.2: Klasifikasi Responden Petugas Lapangan Menurut Jenis Kelamin</u>	67
<u>V.3 : Klasifikasi Responden Pegawai UPTD Perparkiran Menurut Umur</u>	68
<u>V.4: Klasifikasi Responden Petugas Lapangan Menurut Umur</u>	69
<u>V.5: Klasifikasi Responden Pegawai UPTD Perparkiran Menurut Tingkat Pendidikan</u>	70
<u>V.6: Klasifikasi Responden Petugas Lapangan Menurut Tingkat Pendidikan</u> ..	71
<u>V.7: Surat Perintah Tugas Dalam Mengelola Perparkiran</u>	72
<u>V.8: Pelanggaran Dalam Mengelola Perparkiran</u>	74
<u>V.9 : Sanksi Yang Diberikan Apabila Melanggar Peraturan</u>	75
<u>V.10 : Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru</u>	77
<u>V.11 : Jumlah Kendaraan dan Jumlah Bermotor di Kota Pekanbaru</u>	78
<u>V.12 : Standar Operasional Prosedur Koordinator Parkir</u>	78
<u>V.13 : Alur Menyerahkan Hasil Pungutan Retribusi Parkir</u>	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
<u>III.1: Kerangka Pikir Penelitian Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....</u>	41
<u>IV.1 : Bagan Struktur Organisasi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....</u>	65



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. <u>Daftar Wawancara Penelitian Kepada Kasubag Tu Perparkiran</u>	105
2. <u>Daftar Wawancara Penelitian Kepada Staf UPTD Perparkiran</u>	110
3. <u>Daftar Wawancara Penelitian Kepada Koordinator</u>	115
4. <u>Daftar Wawancara Penelitian Kepada Juru Parkir</u>	118
5. <u>Daftar Wawancara Penelitian Kepada Masyarakat</u>	121
6. <u>Photo Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Analisa Kinerja Uptd Perparkiran Dinas Perhubungan Dalam Mengelola Perparkiran Di Kota Pekanbaru</u>	124
7. <u>Sk Dekan Fisipol Uir No.619/Uir-Fs/Kpts/2020 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi An.Silvia Enita</u>	125
8. <u>Surat Rekomendasi Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu An.Silvia Enita</u>	126
9. <u>Surat Rekomendasi No.071/Bpkp-Skp/2020/195 Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik An.Silvia Enita</u>	127
10. <u>Surat Rekomendasi No.071/Bpkp-Skp/2020/267 Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik An.Silvia Enita</u>	129
11. <u>Surat Keterangan No.070/Upt-Prk/130 Tanggal 22 Februari 2021 Tentang Pelaksana Kegiatan Riset Dan Pengumpulan Data An.Silvia Enita</u>	130

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Islam Riau Pekanbaru peserta ujian Komprehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitya Enita
NPM : 177110719
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Komprehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Naskah skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak ada unsur plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacuh pada kaedah - kaedah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya ini adalah benar - benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan yang ada pada butir 1 dan butir 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti dan serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dari fakultas dan universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Pekanbaru 03 Maret 2021

Vana menyatakan


METERAI TEMPEL
10000
DD4BAJX104521517
177110379

**Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas
Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif
Governance**

ABSTRAK

Silvia Enita

Kata Kunci: *Kinerja, Pelaksanaan Perparkiran*

Rendahnya kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola perparkiran menjadi latar belakang penelitian dilakukan. Karena berdasarkan informasi yang dikumpulkan permasalahan-permasalahan tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan sendiri selain perencanaan kerja yang tidak dimaksimalkan, perencanaan retribusi tidak pernah tercapai dengan setiap tahunnya, pungutan parkir tidak sesuai Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009 Tentang Parkir dan Retribusi Parkir, dan adanya perparkiran liar. Tujuan penelitian untuk mengetahui perencanaan dan pelaksanaan kerja di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan *Value For Money*. Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan pengelolaan perparkiran sudah direncanakan walaupun pelaksanaannya belum optimal. Kesimpulannya bahwa mengelola perparkiran masih terdapat koordinator dan juru parkir kurang menaati peraturan, kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada petugas lapangan, Pihak UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan tidak ada merencanakan target parkir, dan tidak ada transparansi tentang proses anggaran. Terkait hal tersebut pengelolaan perparkiran perlu memperhatikan agar pelaksanaan dan perencanaan lebih matang sehingga target parkir terealisasi atau tercapai. Hendaknya pihak UPTD Perparkiran tegas dalam peraturan yang tersedia agar petugas lapangan menaati peraturan karena petugas parkir meminta tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan dan pemerintah transparansi dalam perencanaan mengelola perparkiran serta melibatkan masyarakat terhadap target anggaran karena agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam mengelola perparkiran.

**Performance Analysis UPTD (Technical Implementation Unit Office)
Parking Pekanbaru City Transportation Office With Administrative
Approach Governance**

Abstract

Silvia Enita

Keywords: *Performance, Parking Implementation*

The low performance of the regional device organization of the Pekanbaru City Transportation Office in managing parking became the background of the research conducted. Because based on the information collected the problems do not achieve the targets that have been set by yourself in addition to the work planning that is not maximized, the planning of the levy is never achieved with each year, the parking levy is not in accordance with Local Regulation No.3 of 2009 on Parking and Parking Levy, and the existence of wild parking. The purpose of the research to know the planning and implementation of work in uptd Parking Pekanbaru City Transportation Office With Administrative Approach Governance. The theory used in this study is Accountability, Transparency and *Value For Money*. The results of the study showed that parking management problems have been planned even though the implementation has not been optimal. The conclusion is that managing parking there are still coordinators and parking attendants do not comply with the regulations, the lack of strict sanctions given to field officers, the Uptd Parking Department of the Transportation Department does not plan parking targets, and there is no transparency about the budget process. Related to this, parking management needs to pay attention so that the implementation and planning is more mature so that parking targets are realized or achieved. Parking UPTD should be firm in the regulations available so that field officers comply with the regulations because parking attendants ask for parking rates are not in accordance with the regulations and the government transparency in planning to manage parking and involve the public against budget targets because so as not to occur abuse in managing parking.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi diindonesia melahirkan otonomi daerah dimana penyelenggaraan otonomi daerah membuat setiap daerah mempunyai hak-hak dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pemimpin daerah, mengelola sumber daya daerah, memungut pajak dan retribusi daerah serta mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber pendapatan lain yang sah.

Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur kesejahteraan dirinya sendiri dengan maksud dan tujuan agar lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat serta mempermudah masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana yang besumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Jenis retribusi dapat dikelompokan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa–jasa pelayanan tersebut dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Retribusi dikenakan jasa umum
2. Retribusi dikenakan pada jasa usaha.
3. Retribusi dikenakan pada perizinan tertentu.

Retribusi yang merupakan pendapatan asli daerah sendiri menjadi kewenangan Provinsi/Kabupaten Kota. Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum dimana retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan manfaat serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemungutan retribusi parkir yang bertujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, Retribusi memuat banyak permasalahan-permasalahan di dalamnya baik tantangan serta hambatan baik dari sisi pelaksanaan kegiatan pemungutan retribusi perparkiran maupun pengelolaan.

Kota Pekanbaru mempunyai tugas untuk memungut retribusi parkir yaitu bagian UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran, dimana objek yang diawasi oleh UPTD Perparkiran tersebut meliputi sarana dan prasarana perparkiran, koodinator parkir, juru parkir, dan lokasi perparkiran. Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas perparkiran maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang diusahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas tersebut dapat berupa gedung parkir dan taman parkir. Penyediaan fasilitas parkir ini dapat pula merupakan penunjang kegiatan ataupun bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok misalnya gedung pertokoan ataupun perkantoran.

Didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru, Parkir adalah keadaan Kendaraan Berhenti

atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Tempat parkir umum adalah tempat yang disediakan untuk parkir umum meliputi badan jalan, halaman pertokoan, obyek wisata dan pelataran lingkungan atau gedung yang telah ditentukan oleh pemerintah kota sebagai fasilitas umum untuk parkir, kemudian pada pasal 249 berbunyi :

1. Penyelenggaraan fasilitas parkir dibahu jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
2. Pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan dapat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru, perorangan maupun badan usaha.
3. Pengelolaan fasilitas perparkiran yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan pemerintah kota pekanbaru.
4. Pada ruas jalan tertentu penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan dikenakan tarif khusus dengan pertimbangan kondisi lalu lintas.
5. Pada kegiatan-kegiatan tertentu yang menyediakan fasilitas parkir diberlakukan parkir insidental.
6. Orang atau badan sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menunjuk dan menugaskan juru parkir yang berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan pelayanan :
 - a) Mengatur lalu lintas kendaraan keluar masuk serta penataan parkir;
 - b) Memberikan karcis retribusi parkir dan menerima pembayaran;
 - c) Menjaga keamanan, kertetiban dan kebersihan

d) Melakukan pembinaan dan menyediakan pakaian seragam dan kelengkapannya;

7. Juru parkir bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.
8. Juru parkir tidak boleh mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya kepada pihak lain kecuali izin dari penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk.
9. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru.

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada pasal 1 bahwa UPTD mempunyai tugas membantu kepala Dinas Perhubungan dalam menyelenggaraan kewenangan dibidang pelaksanaan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk lebih rincinya dimana mekanisme pengelolaan parkir berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga (orang atau badan usaha) sesuai dengan pasal 249 dikota Pekanbaru yaitu :

1. UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk mengelola parkir dilapangan melalui koordinator parkir (orang atau badan usaha)
2. Koordinator (orang atau badan usaha) mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala dinas perhubungan mengenai wilayah yang akan dikelola

3. Kepala dinas menunjuk koordinator (orang atau pihak ketiga) yang dianggap layak untuk mengelola melalui surat perintah tugas selain tim survey memberikan hasil data survey lapangan
4. Koordinator (orang atau badan usaha) menunjuk juru parkir untuk memungut retribusi parkir lapangan
5. Koordinator (orang atau badan usaha) bertanggung jawab menyetorkan retribusi parkir ke Dinas Perhubungan (UPTD Parkir) dan kenyamanan lapangan.

(Sumber : UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2019)

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Perparkiran UPTD

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu :

1. Menerima disposisi pimpinan atas permohonan izin perparkiran
2. Mencatat permohonan izin perparkiran
3. Memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan izin perparkiran
4. Melakukan survey lapangan
5. Membuat laporan survey lapangan
6. Membuat draf perizinan perparkiran
7. Paraf draf perizinan perparkiran
8. Penandatanganan perizinan perparkiran
9. Penomoran, cap dinas perizinan
10. Pengiriman dan pengarispan izin perparkiran

Standar Operasional Prosedur Pembuatan Surat Perintah Tugas Koordinator Parkir UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru:

1. Menerima surat permohonan perparkiran
2. Memeriksa surat permohonan perparkiran
3. Survei kelapangan
4. Pembuat surat perintah tugas koordinator parkir
5. Memeriksa/verifikasi surat perintah tugas koordinator
6. Paraf surat perintah tugas koordinator
7. Penandatanganan surat perintah tugas koordinator
8. Penomoran dan cap dinas surat perintah tugas
9. Penyampaian dan pengarsipan surat perintah tugas

Tupoksi Koordinator Parkir UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru yaitu :

1. Koordinator parkir wajib untuk menyerahkan uang hasil pungutannya 1x24 jam kepada bendahara penerima Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai retribusi parkir dengan ketentuan dan jumlah yang telah disepakati.
2. Mengatur petugas pemungut retribusi parkir kendaraan bermotor pada tempat tempat parkir yang telah ditunjuk,serta memberikan karcis parkir kepada pemilik dan / atau pengemudi kendaraan sesuai dengan jenis dan tarif yang berlaku.

3. Koordinator bertanggung jawab atas keamanan, kebersihan lokasi dan ketertiban lalu lintas dalam pelaksanaan tugasnya masing masing pada paket lokasi yang telah ditentukan.

Sanksi Koordinator UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu Koordinator dapat dikenakan sanksi berupa teguran dan pemberhentian apabila:

1. Menyetor kewajiban tidak sesuai dengan waktu yang diteloh ditentukan.
2. Tidak melengkapi atribut juru parkir yang merupakan tanggung jawab koordinator parkir.
3. Tidak bisa menyanggupi kenaikan target yang telah ditetapkan pemerintah kota pekanbaru.
4. Tidak bisa mengatasi semua permasalahan di lapangan yang menjadi tanggung jawab koordinator parkir.
5. Melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Tidak melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan dalam kontrak kerjasama.

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Retribusi Parkir (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan yaitu:

1. Memungut / menerima retribusi parkir dan menyerahkan kebendahara penerima UPTD
2. Menyetorkan uang retribusi parkir
3. Laporan retribusi parkir perbulan
4. Laporan retribusi parkir triwulan

5. Pemeriksaan / verifikasi draf laporan retribusi parkir
6. Paraf draf laporan retribusi parkir
7. Penandatanganan laporan retribusi parkir
8. Pengiriman dan pengarsipan laporan retribusi parkir

Berdasarkan pada informasi yang diperoleh dari UPTD Peparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pengelolaan parkir berdasarkan kontrak kerja dengan pihak ketiga yaitu perorangan sebelum tahun 2021 yang mana perorangan tersebut yang menjadi pengelolaan parkir (koordinator) yaitu Paket A yaitu Bapak Tartar Simanjutak yang memegang wilayah daerah Surdiman sedangkan Paket B di wilayah Ahmad Yani dan Rumbai yang memegang wilayah tersebut Primkoppad Kodim. Tahun 2021 yang mengelola parkir yang mana Perusahaan yaitu PT. Datama.

Berdasarkan sumber informasi dari media dan informasi pemerintah diperoleh kesimpulan bahwa kinerja organisasi pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum maksimal dapat dikemukakan bahwa :

Dari 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Pekanbaru, Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan organisasi perangkat daerah dinilai rendah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Ditahun 2017 Kinerja Dinas Perhubungan mendapatkan nilai C (nilai 30-50) sedangkan Ditahun 2018 semakin menurun mendapatkan nilai D (nilai 0-30). Untuk meningkatkan kinerja tersebut maka seluruh organisasi perangkat daerah harus memahami yang diprogramkan dengan mengkaji program

dimaksud sehingga bermanfaat bagi masyarakat. (*Sumber : Media Suara Pekanbaru, 2019*).

Tabel I.1 Target dan Realisasi Penerimaan Parkir Kota Pekanbaru

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase
2015	Rp.14.273.100.000	Rp.7.202.855.000	50%
2016	Rp.14.273.100.000	Rp.8.253.279.000	57%
2017	Rp.11.273.100.000	Rp.8.804.542.000	78%
2018	Rp.15.273.100.000	Rp.9.229.878.000	60%
2019	Rp.11.905.673.842	Rp.9.477.971.000	80%
2020	Rp. 9.000.000.000	Rp.3.000.000.000	30%
Jumlah			59%

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 6 tahun yang terhitung mulai dari tahun 2015 sampai dngan tahun 2020, dapat dilihat telah terjadinya peningkatan dan penurunan ataupun ketidakstabilan Target dan Realisasi yang diharapkan sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa telah terjadi permasalahan, sehingga berdampak kepada penerimaan yang tidak stabil setiap tahunnya, sedangkan jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat terus bertambah setiap harinya.

Berdasarkan keadaan presentase target penerimaan retribusi parkir bahwa realisasi pendapatan asli daerah dalam bidang retiribusi parkir mengalami pencapaian tertinggi adalah pada tahun 2019 mencapai 80% Sedangkan realisasi paling kecil sebesar 30% pada tahun 2020. Untuk uraian masing-masing target dan realisasi dapat dianalisis seperti dibawah ini. Pada tahun 2019 dilihat dari jumlah realisasi parkir hampir mendekati dengan jumlah yang telah ditentukan, tahun 2020 diperoleh realisasi parkir sebesar 30% , tahun 2015 diperoleh realisasi

parkir sebesar 50%, tahun 2016 realisasi parkir diperoleh sebesar 57%, Tahun 2018 realisasi parkir diperoleh sebesar 60% dan Pada tahun 2017 mengalami kenaikan pencapaian realisasi yang dicapai 78%. Hasil target dan realisasi secara keseluruhan belum mencapai target karena diperoleh rata-rata target dan realisasi dari tahun 2015-2020 sebesar 59%. Menurut pendapat peneliti penerimaan retribusi parkir masih kurang setiap tahunnya. Penerimaan retribusi parkir setiap tahunnya yang mencapai target dan realisasi hanya pada tahun 2019 dan pada tahun sebelumnya tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Hal ini menimbulkan kurang baik bahwa pelaksanaan penegakkan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru masih kurang dipatuhi saat melakukan pengelolaan retribusi parkir dilapangan.

Tabel I.2 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum

NO	Kendaraan	Tarif
1	Sepeda motor	Rp.1000,-
2	Mobil penumpang	Rp.2000,-
3	Mobil bus kecil	Rp.2000,-
4	Mobil bus sedang	Rp.3000,-
5	Mobil bus besar	Rp.4000,-
6	Mobil barang pikap	Rp.2000,-
7	Mobil Barang Sedang (sumbu dua)	Rp.3000,-
8	Mobil Barang Besar (sumbu dua)	Rp.3000,-
9	Mobil Barang Besar (sumbu tiga atau lebih)	Rp.3000,-
10	Kereta tempelan	Rp.3000,-
11	Kereta api Gandengan	Rp.3000,-

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Parkir Retribusi Parkir sepeda motor atau roda dua hanya Rp.1000,00

untuk satu kali parkir. Kendaraan dinas atau pribadi roda empat besaran pungutannya hanya Rp.2.000,00 tiap kali parkir, Sedangkan masih banyak petugas parkir atau juru parkir dalam memungut retribusi parkir tidak sesuai peraturan yang berlaku, contohnya untuk memungut parkir pada sepeda motor banyak juru parkir yang memungut parkir sebesar Rp.2000,00 padahal peraturannya jelas menyebutkan bahwa tarif retribusi parkir sepeda motor adalah Rp.1000,00. Selain masalah tarif parkir juga terdapat masalah baik petugas parkir yang resmi maupun tidak resmi menarik retribusi tidak disertai dengan karcis parkir.

Dan masih banyak juru parkir yang belum menggunakan kelengkapan atribut seperti topi, rompi, sepatu, peluit, dan menggunakan tanda pengenal atau identitas resmi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan menyerahkan karcis untuk sekali parkir dan menerima pemungutan parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Pengawasan parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu dibantu oleh TNI dan Polri.

Jadi kesimpulannya bahwa peraturan daerah yang berlaku kurang dipedulikan oleh Juru Parkir ditepi jalan umum dan juga bisa disebabkan kurangnya perencanaan dari pemerintah, yang mana seharusnya peraturan tersebut diberlakukan untuk menghindari adanya kesewenang-wenang dengan memberi sanksi bagi yang melanggar.

Sehingga masih terdapat beberapa kekurangan yang harus segera diatasi agar kinerjanya dapat lebih ditingkatkan lagi. Pemaparan dari beberapa teori di atas dan membandingkan kondisi lapangan maka penelitian ini menjelaskan

bahwasanya kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum maksimal. Kondisi ini terlihat pada gejala-gejala sebagai berikut :

1. Rendahnya kinerja Organisasi UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas Perparkiran) dengan tidak tercapainya target-target yang telah ditetapkan sendiri selain perencanaan kerja yang tidak dimaksimalkan.
2. Pencapaian Retribusi tidak pernah tercapai dengan setiap tahunnya.
3. Penetapan target yang tidak jelas karena adanya turun naik – turun naik target yang ditetapkan.
4. Pungutan parkir tidak sesuai Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009 Tentang Parkir dan Retribusi Parkir
5. Adanya perparkiran liar itu dalam beroperasi tidak dilengkapi atribut-atribut sebagaimana juru parkir resmi, yakni memiliki id card, mempunyai rompi, dan memberikan karcis.

Jadi berdasarkan fakta-fakta yang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat kinerja dari organisasi pemerintah daerah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian – uraian pada latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, maka penulis hendak mencari tahu mengenai :

“Bagaimana Kinerja UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Kinerja UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perencanaan kerja di UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kerja di di UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

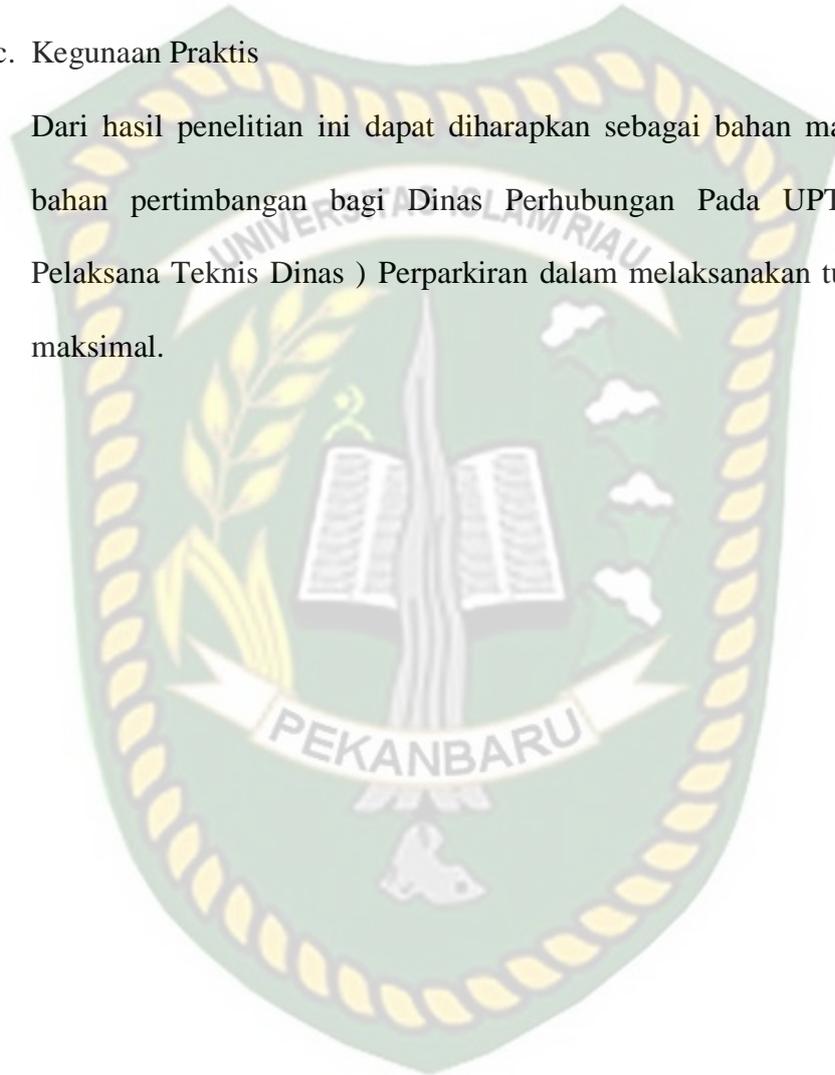
Bahwa dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan organisasi pemerintahan sehingga dapat memberikan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini.

b. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.

c. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Perhubungan Pada UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran dalam melaksanakan tugas secara maksimal.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep dan ketentuan- ketentuan serta aturan – aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya terutama menganalisi data diantara lainnya :

Didalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Prodi Administrasi Publik perlunya konsep Administrasi. Administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau kelompok orang tertentu. Dalam arti sempit, administrasi diartikan keseluruhan proses catat-mencatat,tulis-menulis,surat-menyurat (Korespondensi) dan penataan, penyusunan dokumen – dokumen tertulis lainnta yang dibuat dan dibukukan oleh suatu organisasi. Dalam arti luas, administrasi diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama sekelompok orang (sejumlah orang) dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan/disepakati sebelumnya. (Zulkifli,2009:8).

Sedangkan menurut Dwight Waldo (1996 : 24) Administrasi adalah suatu bentuk daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas yang tinggi.

Menurut Sondang P. Siagian (2004:2) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan- keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Herbert A.Simon (1959:3) “ Admnistration can be defned as the acitivities of groups cooperating to accomplish common goals. Simon memberikan pemahaman bahwa administrasi sebagai kegiatan- kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan bersama .

Dari definisi diatas maka penulis berkesimpulan bahwa administrasi merupakan suatu proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang / sejumlah orang dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam konteks studi administrasi terdapat adanya organisasi yang mengelola untuk tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Siagian (dalam Zulkifi 78 : 2009) mendefinisikan organisasi sebagai bentuk persektuan antar dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujaun yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang / beberapa orang yang disebut atasan dan seorang / sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Masiie (dalam Zulkifi 78 : 2009) Organisasi merupakan suatu kerja sama sekelompok orang yang membagi tugas- tugasnya dianatra para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas- aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Griffin (2000) organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu.

Dari definisi diatas penulis berkesimpulan bahwa organisasi merupakan suatu tempat atau wadah dimana sekelompok orang yang menyatakan komitmen atau persetujuan untuk kerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan sebelumnya.

Didalam konteks organisasi terdapat adanya manajemen yaitu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial melalui kegiatan – kegiatan orang lain (Siagian 2003;5).

Menurut George R. Terry (dalam Zulkifli dan Yogia 2014;18) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning,organizing,actuating dan controlling dimana pada masing- masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Stoner,et.al (dalam Zulkifli dan Yogia 2014;17) berpendapat bahwa manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan,memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan definisi diatas manajemen diisyaratkan sebagai proses didalam organisasi, dimana proses tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi menggunakan sumber daya yang terdapat dalam organisasi tersebut.

1. Konsep Kinerja Organisasi

a. Definisi Kinerja Organisasi

Organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah memperbaiki kinerjanya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah artinya agar pemerintah dapat menjalankan pemerintahan dengan efektif dan efisien dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Menurut Wibowo (2008:7) kinerja berasal dari performance adalah hasil kerja atau prestasi kerja. Sedangkan menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo 2008:7) Kinerja adalah hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi pada ekonomi.

Sedangkan menurut Mahsun (2006:25) Kinerja adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategis planning suatu organisasi. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang akan dicapai.

Menurut Pasolong (2010:175) Kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai yaitu hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Sedangkan menurut Wibowo

dalam Pasolong (2010:176), kinerja organisasi merupakan efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok-kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai kebutuhannya secara efektif.

Menurut Sinambela (2012:18) Kinerja organisasi merupakan kumulatif kinerja pegawai, oleh karenanya semakin tinggi kinerja pegawai akan semakin tinggi juga kinerja organisasi. Sedangkan menurut Nasucha dalam (Sinambela,2012:186), kinerja organisasi adalah efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhannya yang efektif.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dari kinerja organisasi adalah Hasil kerja dari kegiatan kerjasama diantara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Amstrong dan Baron dalam (Wibowo,2011:300), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja :

- a) Faktor personal : Pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.

- b) Faktor kepemimpinan : Kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.
- c) Faktor tim : Kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- d) Faktor sistem : Sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja organisasi.
- e) Faktor kontekstual (situasional) : Tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Menurut Kamsir (2016) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku kinerja yaitu kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rencana kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen dan disiplin kerja.

Sedangkan menurut Pasolong (2010:186) Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi yaitu kemampuan, energi, teknologi, kompensasi, kejelasan tujuan dan keamanan.

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor internal seperti faktor personal, kepemimpinan, kerja tim, sistem, struktur organisasi, strategi pilihan, kultur organisasi, dukungan teknologi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu faktor situasional/lingkungan yaitu ekonomi, sosial, politik, keamanan dan hukum.

2. Konsep Manajemen Kinerja

a. Definisi Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja merupakan manajemen menciptakan hubungan dan memastikan komunikasi yang efektif. Manajemen kinerja memfokuskan apa yang diperlukan oleh organisasi, manajer, dan pekerja untuk berhasil. Manajemen kinerja yaitu tentang bagaimana kinerja dikelola untuk mencapai tujuan organisasi.

Terdapat beberapa pandangan para pakar tentang pengertian manajemen kinerja. Menurut Bacal (1999:4) manajemen kinerja sebagai proses komunikasi yang dilakukan secara terus menerus dalam kemitraan antara pegawai dengan atasannya. Proses komunikasi ini meliputi kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan yang akan dilakukan.

Sedangkan Wibowo (2013:7) Proses komunikasi merupakan suatu sistem memiliki sejumlah bagian yang semuanya harus diikuti sertakan apabila manajemen kinerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi organisasi, manajer, dan karyawan.

Bacal menekankan manajemen kinerja sebagai proses komunikasi sedangkan Menurut Armstrong (2004:29) manajemen kinerja lebih melihat sebagai sarana untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari organisasi dan tim dengan memahami dan mengelola kinerja dalam suatu kerangka tujuan, standar, dan persyaratan-persyaratan atribut-atribut yang disepakati.

Fletcher yang menyatakan manajemen kinerja sebagai berkaitan dengan pendekatan menciptakan visi bersama tentang maksud dan tujuan organisasi, membantu karyawan memahami, dan mengenal bagiannya dalam memberikan

kontribusi, mengelola, dan meningkatkan kinerja baik individu maupun organisasi.

Menurut Irham Fahmi dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kinerja, Teori dan Aplikasi” (2011:3) manajemen kinerja adalah suatu ilmu yang memadukan seni didalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat fleksibilitas yang representatif dan aspiratif guna mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan cara mempergunakan orang yang ada di organisasi tersebut secara maksimal. Organisasi yang profesional tidak akan mampu mewujudkan suatu manajemen kinerja yang baik tanpa ada dukungan dari seluruh komponen manajemen perusahaan dan tentunya para pemegang saham. karena konteks manajemen modern suatu kinerja yang sinergi tidak akan bisa berlangsung secara maksimal jika pihak pemegang saham perusahaan hanya bertugas untuk menerima keuntungan tanpa memperdulikan berbagai persoalan internal dan eksternal yang terjadi di perusahaan.

Sedangkan Mahmudi dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kinerja Sektor Publik” (2013:5), mengatakan bahwa manajemen kinerja adalah proses sistematis yaitu memperbaiki kinerja diperlukan langkah-langkah atau tahap-tahap terencana yang baik. Proses perbaikan kinerja bukan merupakan kerja jangka pendek melainkan jangka panjang. Budaya merupakan produk suatu tradisi yang panjang. Perubahan budaya memerlukan waktu yang lama. Demikian juga melakukan perubahan budaya kinerja memerlukan perencanaan yang matang dan jangka panjang.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Manajemen kinerja adalah tata kelola kinerja individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai, dan manajemen kinerja memerlukan proses yang matang dan jangka panjang.

b. Tujuan Manajemen Kinerja Organisasi

Menurut Williams, 1998; Armstrong & Baron, (2005;Wibisono 2006)

Tujuan dari manajemen kinerja yaitu :

- a) Mengatur kinerja organisasi dengan lebih terstruktur dan terorganisir.
- b) Seberapa efektif dan efisien dalam suatu kinerja organisasi.
- c) Menentukan keputusan organisasi yang berkaitan dengan kinerja organisasi dan kinerja individual.
- d) Meningkatkan kemampuan organisasi dengan perbaikan.
- e) Mendorong pegawai agar bekerja sesuai prosedur dengan semangat dan produktif sehingga hasil kerjanya optimal.

Jadi kesimpulannya tujuan manajemen kinerja organisasi adalah mendapatkan kinerja terbaik pegawai dan organisasi untuk mencapai profit dan pertumbuhan sambil mengembangkan kompetensi pegawai dengan menghadapi tugas -tugas menantang.

c. Analisis SWOT

Analisis SWOT menurut Philip Kotler (2009) diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sedangkan menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT diartikan sebagai:“ Analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strength*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threath*)”.

Menurut Sondang P. Siagian analisis SWOT (2000) merupakan salah satu instrument analisis yang ampuh apabila digunakan dengan tepat telah diketahui pula secara luas bahwa SWOT merupakan akronim untuk kata-kata *Strength* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Treath* (Ancaman).

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yaitu *Strength*, *Opportunities*, *Weaknesses*, *Threath*.

Analisis SWOT merupakan singkatan dari *Strength*, *Weaknesses*, *Opportunities*, *Threats* dimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan adalah Sumber daya keterampilan atau keunggulan keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor kekuatan yang dimaksud dengan faktor-faktor yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra merek dapat merupakan sumber kelemahan.

Faktor-faktor kelemahan jika orang berbicara tentang kelemahan yang terdapat dalam tumbuh suatu perusahaan yang dimaksud ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bisa terlihat

dari sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.

3. Peluang (*Opportunity*)

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan atau organisasi. Faktor peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis.

Yang dimaksud dengan berbagai situasi tersebut antaralain:

- a) Kecenderungan penting yang terjadi dikalangan pengguna produk.
- b) Identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian.
- c) Perubahan dalam kondisi persaingan.
- d) Perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang membuka berbagai kesempatan baru dalam kegiatan berusaha.
- e) Hubungan dengan para pembeli yang akrab.
- f) Hubungan dengan pemasok yang harmonis

4. Ancaman (*Threat*)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama

bagi posisi sekarang yang diinginkan organisasi. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. Ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis, jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan.

Menurut Tripomo, Tedjo, dan Udan (2005:35) Suatu analisa strategi harus memperhatikan faktor - faktor SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) yakni sebagai berikut:

- 1) Kekuatan (*Strength*)
 - a. Tersedianya peraturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Tersedianya sumber daya manusia baik kualitas maupun kuantitas.
 - c. Cukup tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung.
 - d. Adanya kesadaran masyarakat
- 2) Kelemahan (*Weakness*)
 - a. Kurang profesionalnya aparatur.
 - b. Belum membudayakan transparansinya pengelolaan manajemen yang baik.
 - c. Belum terakumulasinya kesadaran masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan.

d. Belum tersedianya data yang akurat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan.

3) Peluang (*Opportunity*)

- a. Adanya kesempatan usaha.
- b. Adanya perkembangan dari dunia usaha (globalisasi).
- c. Tersedianya lintas sektorial.
- d. Meningkatkan mobilitas barang dan jasa.
- e. Adanya koordinasi antar instansi terkait.

4) Ancaman (*Threath*)

- a. Dampak ekonomi yang berkepanjangan.
- b. Situasi keamanan yang kurang kondusif.
- c. Geografis yang tidak mendukung.
- d. Komunikasi kurang lancar

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi atau perusahaan yang menggambarkan secara jelas peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi/perusahaan sehingga dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan organisasi/perusahaan. Matriks ini menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu strategi S-O, strategi W-O, strategi S-T dan strategi W-T.

Keterangan:

- a. Strategi SO Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- b. Strategi ST Merupakan strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

- c. Strategi WO Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
- d. Strategi WT Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

3. Konsep Good Governance

a. Definisi Good Governance

Good Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank memberikan definisi governance sebagai “ *the way state power is used managing economic and social resources for developmetn of society*”. Sedangkan Unite Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “ *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP dalam Mardiasmo (2004:23) lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan aadministratif dalam pengelolaan negara. Dalam konsep good governance memiliki 3 pilar penting yaitu :

1. Political governance mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*Policy / Strategy Formulation*).
2. *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penuruan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup.

3. Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan atau dalam tata pelaksanaan kebijakan.

Menurut World Bank dan UNDP dalam Mardiasmo (2004:24) Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Pengertian good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sedangkan World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar efisien penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Selama birokrasi didaerah tidak kompeten. Dalam kondisi pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Disisi lain mereka jugak harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintah yang bersih dan transparan.

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas.

Governance menurut redefinisi peran negara dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten. Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.

Dari definisi diatas maka penulis berkesimpulan bahwa Good Governance merupakan pertumbuhan sektor publik yang bersinergis untuk mengelola sumber daya yang dimiliki suatu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat secara bertanggungjawab sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari kepentingan diri sendiri seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. Prinsip – Prinsip Good Governance

Prinsip-Prinsip Good Governance Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola pelayanan dari birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan

birokrasi pemerintah pun harus memberikan kontribusi dalam usaha pengelolaan sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan penyeimbang Negara. Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan kedepan. Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah untuk memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.

Adapun karakteristik good governance menurut UNDP dalam Mardiasmo (2004:24) mengungkapkan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan good governance meliputi :

1. Partisipasi : Terlibat masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2. Supremasi Hukum : Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandangan bulu.
3. Transparansi: Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsivitas: Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

5. Orientasi Konsensus: Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. Ekuitas: Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efisiensi dan Efektivitas: Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara bedaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Akuntabilitas : Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. Visi Strategis : Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Menurut Mardiasmo (2004:25) dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga pilar yang saling berkaitan untuk mewujudkan good governance yaitu: Akunrabilitas, Transparansi dan Value for money.

4. Konsep Akuntabilitas

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sjahrudin Rasul (2000) menyatakan bahwa Akuntabilitas didefinisikan secara sempit sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap

masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

J.B. Gharthey (1998) menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship merupakan apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran-anggaran tersebut.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah sebagai perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan.

Menurut Elwood (1993) dalam Mardiasmo (2009:21-22) menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yang dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu :

- a. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum yaitu penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi, sedangkan akuntabilitas hukum yaitu jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan

peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

- b. Akuntabilitas Proses yaitu prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- c. Akuntabilitas Program yaitu pertimbangan tujuan yang ditetapkan apakah dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
- d. Akuntabilitas Kebijakan yaitu terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR, DPRD, dan masyarakat luas.

Menurut Syahrudin Rasul (2002:11) ada lima dimensi akuntabilitas yaitu sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran
- b. Akuntabilitas Manajerial
- c. Akuntabilitas Program
- d. Akuntabilitas Kebijakan
- e. Akuntabilitas Finansial

5. Konsep Transparansi

Menurut Mardiasmo, (2004:25) Transparansi adalah bahwa masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik.

Menurut Nico Andrianto, (2007:20) Transparansi adalah keterbukaan kepada masyarakat yang meliputi fungsi dan struktur pemerintah, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksinya.

Dapat disimpulkan bahwa Transparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat tentang semua informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintah.

Menurut Nico Andrianto, (2007: 21) Transparansi anggaran membawa dampak positif bagi kepentingan publik. Adapun Manfaat adanya transparansi anggaran yaitu:

1. Dapat mencegah terjadinya korupsi
2. Mudah dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
3. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah

4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
5. Memperkuat kohesi sosial karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
6. Menciptakan iklim investasi yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepastian usaha.

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator Menurut Nico Ardianto (2007: 21), Indikator transparansi yaitu:

1. Kerangka kerja hukum bagi transparansi
 - a. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi.
 - b. Tersedianya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
 - c. Tersedianya basis legal untuk pajak.
 - d. Tersedianya basis legal untuk pertanggungjawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintah daerah.
 - e. Tersedianya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.
2. Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
 - a. Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - b. Mengumumkan setiap kebijakan anggaran.

- c. Dipublikasikan hasil laporan anggaran yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang
 - d. Dokumentasi anggaran yang baik yang mengandung beberapa indikasi fiskal.
 - e. Terbuka informasi tentang pembelanjaan aktual.
3. Adanya audit yang independen dan efektif.
 - a. Lembaga audit yang independen dan efektif.
 - b. Kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - c. Sistem peringatan dini dalam kasus buruknya eksekusi atau keputusan anggaran.
 4. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - a. Keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.
 - b. Kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Edah Jubaedah (2008:66) mengatakan bahwa karakteristik transparansi dalam model pengukuran pelaksanaan Good Governance yaitu :

Ketersediaan Payung hukum bagi akses informasi publik

- a. Ketersediaan mekanisme bagi publik untuk mengakses informasi
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mengakses informasi
- c. Ketersediaan informasi untuk dipublikasikan kepada publik
- d. Kecepatan dan kemudahan mendapatkan informasi publik.

6. Konsep *Value For Money*

Menurut Nico Andrianto (2007: 89), Konsep *Value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap uang”. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002: 4) *Value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik didasarkan dengan tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisien, dan efektivitas. *Value for money* adalah pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor publik. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan semata akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan input, output dan outcome secara bersama-sama.

Value for money diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

- a. Ekonomi yaitu pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.
- b. Efisiensi yaitu penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (Berdaya guna)
- c. Efektivitas yaitu penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Mardiasmo (2002: 130), Indikator *Value for money* dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi) Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga

terbaik (spending less). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendahrendahnya (spending well).

- b. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas) Kualitas pelayanan (efektivitas) Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (spending wisely).

Menurut Mardiasmo, (2002: 133) *Value for money* dapat diukur dengan empat langkah pengukuran yaitu:

- a. Pengukuran Ekonomi

Ekonomi adalah pengukuran relatif yaitu pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan.dalam berapa hal yang dapat digunakan untuk mengukur ekonomi yaitu biaya organisasi yang sesungguhnya terjadi lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan biaya organisasi yang sesungguhnya terjadi lebih besar dibandingkan biaya organisasi lainnya

- b. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi adalah hal penting dalam konsep *value for money*. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Jadi apabila semakin besar output dibanding input maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

- c. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah suatu ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi berjalan dengan efektif. Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya diperbolehkan melebihi yang telah dianggarkan bisa dua kali

lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar daripada yang dianggarkan. Efektivitas hanya melihat suatu kegiatan telah atau belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

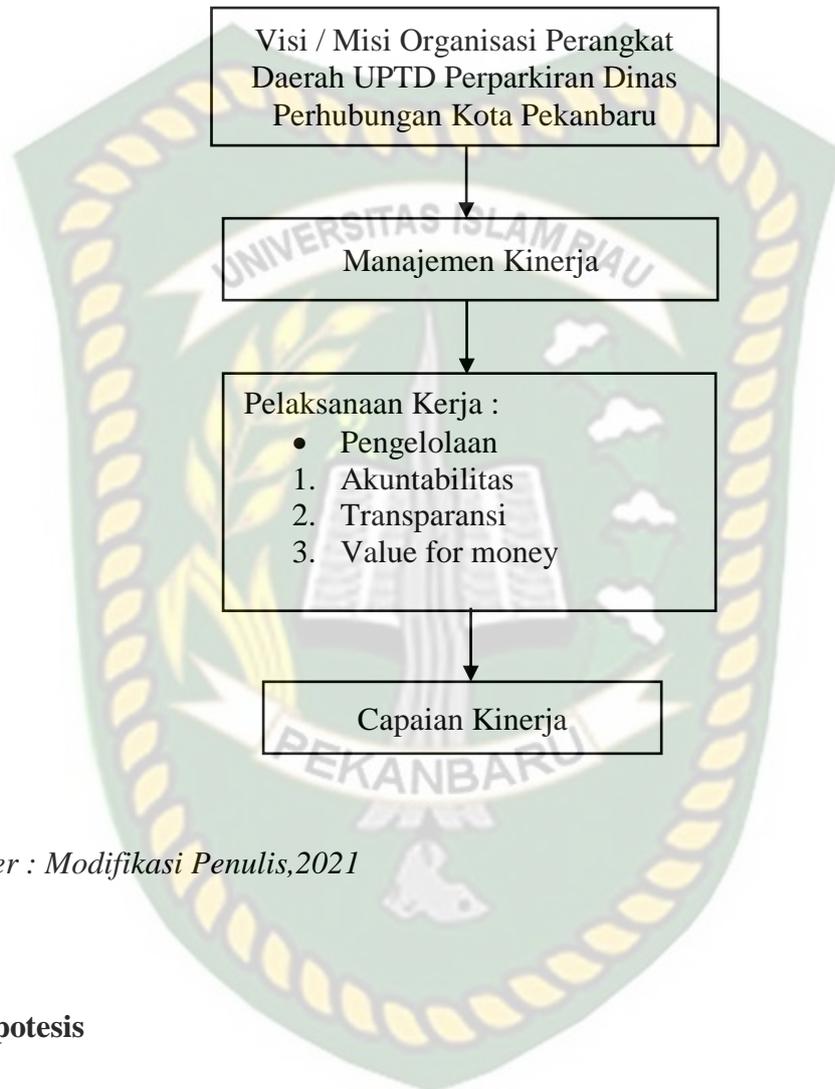
d. Pengukuran Outcome

Outcome adalah dampak dari suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome nilainya akan lebih tinggi daripada output, karena output hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat, sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampaknya terhadap masyarakat.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk membentuk menjelaskan pikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi yang berhubungan dengan penelitian ini dengan memamparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator penentu berdasarkan konsep maupun teori penentu berdasarkan konsep maupun teori yang dianggap relevan.

Gambar II.1: Kerangka Pikir Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Dalam Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance



Sumber : Modifikasi Penulis,2021

C. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat merumuskan suatu hipotesis bahwa : Diduga Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance Belum maksimal.

D. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menguraikan konsep operasional sebagai berikut :

- a) Kinerja organisasi adalah hasil kerja dari kegiatan UPTD Perparkiran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan atau ditetapkan.
- b) Faktor personal / individu adalah pegawai – pegawai yang ada di UPTD Perparkiran mempunyai kemampuan dan keterampilan.
- c) Faktor kepemimpinan adalah motivasi yang diberikan oleh kepala UPTD perparkiran untuk petugas-petugas parkir dalam memungut retribusi parkir.
- d) Faktor tim adalah semangat yang diberikan oleh pegawai UPTD perparkiran dan kepercayaan sesama pegawai dinas perhubungan kota pekanbaru.
- e) Faktor sistem adalah fasilitas kerja diberikan oleh Kepala UPTD Perparkiran kepada petugas – petugas parkir seperti kelengkapan atribut.
- f) Manajemen kinerja adalah kepala UPTD Perparkiran menetapkan tata kelola kinerja kepada pegawai agar tujuan nya tercapai.
- g) Analisis SWOT adalah penilaian terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman oleh UPTD Perparkiran.
- h) Akuntabilitas
Kepatuhan pada alur dan proses dalam mengelola perparkiran dinas perhubungan kota pekanbaru.
- i) Transparansi

Keterbukaan pengelolaan aturan dan proses dalam mengelola perparkiran dinas perhubungan kota pekanbaru.

j) Value for money

Pelaksanaan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pengelolaan perparkiran.

k) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perhubungan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian
1	2	3	4
Menurut UNDP dalam Mardiasmo(2004:25) Prinsip-prinsip pelaksanaan good governance yaitu akuntabilitas, transpransi, value for money	Analisis Kinerja UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance	Akuntabilitas	1. Kejujuran terhadap hukum 2. Proses (Administratif)
		Transparansi	1. Keterbukaan terhadap informasi 2. Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran 3. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan
		Value for money	1. Ekonomi 2. Efisiensi 3. Efektivitas

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis mendapatkan data dan informasi, maka dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian survey deskriptif dan metode kualitatif, penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relative.

Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dan informasi yang diperoleh dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan Kinerja UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian, terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi dari suatu objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar.

Penelitian ini dilakukan di Instansi Pemerintah yaitu Dinas Perhubungan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perpustakaan Kota Pekanbaru untuk mengetahui Bagaimana Kinerja UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance.

Alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasari oleh pengamatan penulis dilapangan yang melihat belum maksimalnya Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance.

C. Key Informan dan Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang bagaimana latar belakang kondisi penelitian. Adapun narasumber dari penelitian ini yaitu UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru , key informan dalam penelitian ini yaitu Kepala UPTD Perparkiran, Informan dalam penelitian ini yaitu Kasubag TU UPT Perparkiran, Staf Administrasi, Koordinator Blok, Juru Parkir, dan Masyarakat.

Tabel III.1: Key informan dan Informan pegawai UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

NO	Keterangan	Populasi	Sampel
1.	Kepala UPTD Perparkiran	1	1
2.	Kasubbag TU UPTD Perparkiran	1	1
3.	Staf Administrasi	8	4
4.	Pengawas Regu I	14	2
5.	Pengawas Regu II	8	2
Jumlah		24	10

Sumber : Data Olahan Penulis,2020

Pada tabel III.1 Kepala UPTD Perparkiran 1 orang dan sampel dijadikan 1 orang, Kasubbag TU UPTD Perparkiran 1 orang dan sampel dijadikan 1 orang, Staf Administrasi 8 orang dan sampel dijadikan 4 orang, Pengawas Regu I 14 orang dan sampel dijadikan 1 orang, dan Pengawas Regu II 8 orang dan sampel dijadikan 1 orang.

Sedangkan untuk populasi lapangan terdiri dari koordinator blok,juru parkir, dan masyarakat yang berada diparkir utama dikota pekanbaru yaitu

dipasar sukaramai, pasar senapelan dan pasar bawah . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2: Jumlah Informan Petugas Lapangan

NO	Keterangan	Populasi	Sampel
1.	Koordinator Blok	11	3
2.	Juru Parkir	213	12
3.	Masyarakat	~	15
	Jumlah	~	30

Sumber : Data Olahan Penulis,2020

Pada tabel III.2 Alasan mengambil wilayah parkir utama di Kota Pekanbaru karena tempat wilayah tersebut yang menghasilkan Pendapatan Anggaran Daerah yang cukup besar setiap tahunnya.

Adapun sampel penelitian yang diambil sebanyak 20 orang di lapangan, pada koordinator blok dari 11 orang diambil sampel 3 orang , juru parkir dari 213 orang diambil sampel 12 dan dari masyarakat yang tidak terhingga diambil sampel 15 orang.

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam pemilihan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi sebagai kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Adapun sampel tersebut yaitu Kepala UPTD Perparkiran, Kasubbag TU UPTD Perparkiran, Staf Administrasi, Pengawas Regu I dan Pengawas Regu II dan peneliti menggunakan teknik *Accidental Sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,yaitu konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Adapun sampel tersebut yaitu Koordinator Blok, Juru Parkir, dan Masyarakat.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah :

a. Data Primer :

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penelitian dilapangan mengenai Kinerja Pada UPTD Perparkiran. Pengambilan data ini melalui wawancara, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Kinerja Pada UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis peroleh dan kemudian untuk mendukung tujuan penelitian ini baik melalui dalam bentuk studi kepustakaan berupa buku -buku, dokumen maupun data yang diperoleh dari UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian mengenai permasalahan dalam penelitian ini sehubungan dengan kegiatan-kegiatan mengenai kinerja UPTD Perpustakaan.
- b. Wawancara yaitu Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dengan responden, penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tentang Kinerja UPTD Perpustakaan yang dijadikan oleh penulis sebagai alat bantu untuk mewawancarai responden dalam proses pengumpulan data dan informasi.
- c. Dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data dengan kegiatan mengumpulkan dan menyusun data pada penelitian ini dalam bentuk foto, gambar dan lain-lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian. Foto-foto tersebut digunakan sebagai informasi tambahan yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

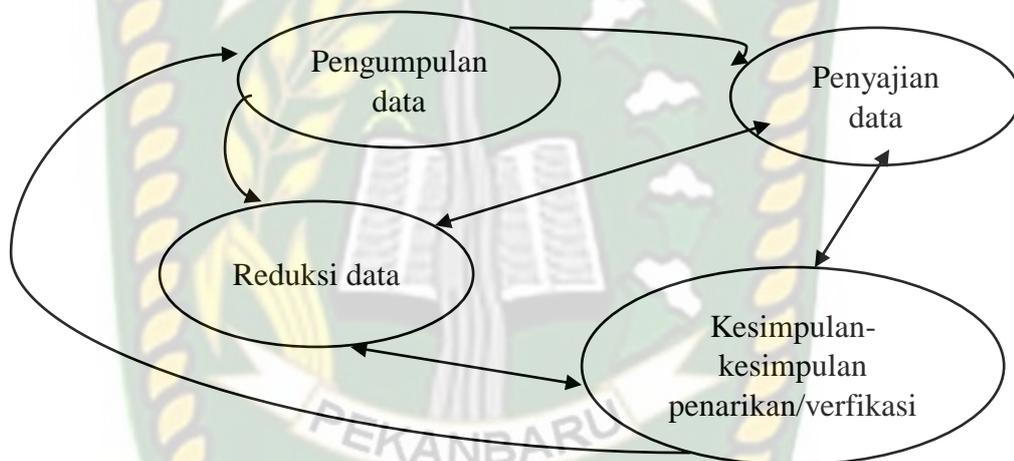
G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini melalui alat penelitian berupa daftar wawancara lalu dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan dan diolah secara kualitatif. Kemudian data tersebut di presentasikan dan jelaskan serta dianalisis secara deskriptif sesuai dengan data yang didapat guna menganalisa mengenai hasil dari pembahasan penelitian untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, kemudian diambil kesimpulan dari hasil pembahasan tersebut. Terdapat beberapa cara yang biasanya dipilih untuk mengembangkan validitas data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik validitas data triangulasi.

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan kebasahanan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap hasil tersebut.

Secara skematis proses analisa data menggunakan proses analisis data menggunakan model analisis data dan interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar III.1: Model analisis data dan interaktif Miles dan Huberman



Sumber : Modifikasi Penulis,2020

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian yang dimulai pada bulan september 2020 sampai dengan february 2021.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 3: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance

NO	Kegiatan	Bulan dan Minggu 2020-2021																							
		Sept 2020				Okt 2020				Nov 2020				Des 2020				Jan 2021				Feb 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal	■	■	■	■																				
2	Ujian Proposal							■																	
3	Revisi Proposal																								
4	Kuesioner																								
5	Rekomendasi Survey																								
6	Survey Lapangan																								
7	Analisis Data																								
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																								
9	Konsultasi Revisi Skripsi																								
10	Ujian Konfrehensif Skripsi																								
11	Revisi Skripsi																								
12	Pengandaan Skripsi																								

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau yang menyanggah predikat ibukota provinsi Riau. Kota Pekanbaru ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian Timur Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.

Kota ini berawal dari sebuah yang didirikan oleh para pedagang minangkabau di tepi sungai Siak. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Kota Pekanbaru mempunyai satu bandara udara internasional yaitu Bandara Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi yaitu Bandara Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.

1. Keadaan Geografis

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur lintar timur Sumatera terhubung dengan beberapa kota seperti Padang, Medan

dan jambi dengan wilayah administratif diapit oleh kabupaten siak dan kabupaten kampar di sebelah utara; kabupaten kampar dan kabupaten pelalawan di sebelah selatan; kabupaten siak dan kabupaten pelalawan di sebelah timur; dan kabupaten kampar di sebelah barat.

Kota pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ bujur timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ lintang utara, dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. Luas wilayah kota pekanbaru adalah 632,26 km², dengan 12 kecamatan dan 83 kelurahan, 747 rukun warga dan 3.026 rukun tetangga. Kecamatan di kota pekanbaru adalah bukit raya, lima puluh, marpoyan damai, payung sekaki, pekanbaru kota, sail, senapelan, sukajadi, rumbai, rumbai pesisir, taman dan tenayan raya.

2. Kependudukan

Sejak tahun 2013, pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di pulau sumatra, setelah medan dan palembang. Laju pertumbuhan ekonomi pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 38,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan bahasa minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota pekanbaru, selain bahasa indonesia. Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah melayu, jawa, tionghoa, dan batak. Perpindahan ibu kota

provinsi riau dari tanjung pinang ke pekanbaru tahun 1959, memiliki andil besar menempatkan suku melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya provinsi kepulauan riau dari pemekaran provinsi riau.

Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

3. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

Visi dan Misi Kota Pekanbaru 2021 sebagaimana tertuang sesuai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2001 yaitu :

a. Visi

“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa.”

b. Misi

“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia memiliki kompetensi tinggi,bermoral,beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal,nasional maupun internasional.

B. Gambaran Umum Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 Oktober 1988 sesuai dengan surat keputusan menteri perhubungan sebagai instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan perekonomian di Indonesia khususnya Kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan PP No. 25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah Perda No. 7 Tahun 2001 membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 1999 oleh UU No. 32 Tahun 2004 serta PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atau Dishub Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan ini terletak di Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.

2. Visi dan Misi Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian visi Kota Pekanbaru tahun 2025, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menetapkan visi, misi dan tujuan, sasaran serta arah kebijakan. Adapun visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah:

“Terwujudnya Tingkat Kualitas dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, Menyeluruh, Handal dan terjangkau.”

Visi ini mempunyai makna yaitu Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang sudah diberikan akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan kota dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi pemerintah kota Pekanbaru. Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan kota Pekanbaru, maka Visi tersebut di jabarkan menjadi empat Misi yang diemban yaitu :

1. Meningkatkan dan memberdayakan sumber daya manusia perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, dan meningkatkan aksebelitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketresediaan/kecukupan dan kehandalan sarana dan prasarana, sietem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Berdasarkan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan kota

Pekanbaru mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan sebagian urusan pemerintah Daerah Kota di bidang Perhubungan. Sesuai Peraturan Daerah tersebut, susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub bagian penyusunan Program
- c. Bidang Angkutan
 - 1) Seksi Angkutan Jalan
 - 2) Seksi Angkutan dan Penyuluhan
 - 3) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
- d. Bidang Wasdal Lalu Lintas
 - 1) Seksi Wasdal Lalu Lintas Jalan
 - 2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 3) Seksi Wasdal Lalu Lintas Perairan dan Udara
- e. Bidang KTS dan Prasarana
 - 1) Seksi keselamatan dan Teknik Sarana Lalu Lintas Jalan
 - 2) Seksi Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan
 - 3) Seksi teknis Sarana, Prasarana, dan keselamatan Lalu Lintas Perairan dan Udara
- f. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 1) Sekretaris

g. UPTD Parkir

1) Sekretaris

h. UPTD Terminal

1) Sekretaris

i. UPTD Kepelabuhan

1) Sekretaris

j. UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan /Trans Metro Pekanbaru

1) Sekretaris

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai rincian tugas adalah:

- 1) Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang Perhubungan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah;
- 2) Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas;
- 3) Menyusun rencana program bidang perhubungan;
- 4) Menyusun kebijakan pelaksanaan Perhubungan;
- 5) Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Dinas Perhubungan dalam rangka mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD secara terpadu dan tugas pelayanan administratif lingkup Dinas Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan bagian sekretariat dan Dinas.
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk dan tata laksana administrasi umum/perengkapan, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Rencana Anggaran Biaya dan Perlengkapan Dinas.
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan peraturan pelaksanaan rapat dinas, upacara dan keprotokolan.
- 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan sekretariat dinas.
- 6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan dan gedung kantor.
- 7) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bagian sekretariat.
- 8) Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang tugasnya.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala dinas.

a. Kepala UPTD Parkir

Kepala UPTD Perparkiran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang perparkiran dan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
3. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan lapangan.
4. Mengkoordinasikan system dan tata cara pengaturan perparkiran diberbagai kawasan di Kota Pekanbaru.
5. Menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas pada kawasan parkir.
6. Melakukan penindakan terhadap kendaraan yang melanggar parkir dengan melaksanakan penderekan.
7. Melakukan koordinasi pengaturan serta penyelenggaraan perparkiran.
8. Mengkoordinasikan mekanisme pungutan retribusi parker.

9. Menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir kepada bendahara yang kemudian di setorkan ke kas daerah.
10. Mengupayakan standar pelayanan minimal pada kegiatan perparkiran.
11. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil operasional penyelenggaraan perparkiran.
12. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait untuk mencapai pelaksanaan tugas.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas-tugasnya.

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Parkir

1. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD.
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan.
3. Mewakili kepala UPTD apabila bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
4. Melaksanakan pelayanan urusan dalam pada kantor UPTD.
5. Menyusun kebutuhan perbekalan dan materi di lingkungan UPTD.
6. Melaksanakan kebutuhan kebersihan, ketertiban, keindahan, kenyamanan ruangan dan halaman serta pengamanan di lingkungan UPTD.

7. Melaksanakan verifikasi terhadap penerimaan dan pengaturan serta pertanggung jawaban keuangan.
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwasanya dalam pengelolaan retribusi parkir dinas perhubungan kota Pekanbaru mencakup;

1. Koordinator Parkir
 - a. Mengajukan permohonan pengelolaan area parkir kepada kepala Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.
 - b. Mengambil uang setoran retribusi parkir dari juru parkir.
 - c. Mengawasi pelaksanaan tugas juru parkir.
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perparkiran yang telah disetujui.
 - e. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada juru pungut Dinas Perhubungan.
 - f. Melaporkan kendala/hambatan yang dihadapi dilapangan kepada Dinas Perhubungan.
2. Juru Pungut
 - a. Mengawasi pelaksanaan parkir di lapangan, seperti:
 1. Ketertiban kendaraan yang parker.
 2. Kedisiplinan juru parkir dalam bertugas (kelengkapan atribut, jadwal dan tatakrama).

- b. Mengontrol dan mengambil setoran retribusi parkir dari koordinator parker.
 - c. Mengecek dan melaporkan kondisi riil yang dihadapi koordinator parkir lapangan terhadap kendala yang dihadapi.
 - d. Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada Bendahara penerimaan Dinas Perhubungan.
 - e. Mengevaluasi kinerja koordinator parkir dan juru parkir kepada Kepala UPTD Parkir untuk diambil tindak lanjut jika terjadi penyimpangan.
3. Bendahara penerimaan
 - a. Menerima setoran retribusi parkir dari juru pungut parkir.
 - b. Melakukan penatausahaan pembukuan keuangan penerimaan retribusi parkir.
 - c. Mengontrol dan mengevaluasi penerimaan retribusi parkir setiap hari/bulan.

5.Struktur Organisasi UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru

Adapun Struktur Organisasi UPTD Perparkiran Kota Pekanbaru Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi UPTD Perparkiran



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance. Penelitian ini mengambil data yang dibutuhkan dalam hal mengambil kesimpulan. Adapun data dan hasil responden yang dilakukan dalam penelitian ini akan dipaparkan.

A. Identitas Responden

Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting adalah responden karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance. Jadi data yang didapat dalam penelitian ini bersumber dari pegawai UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan berjumlah 10 orang dan petugas lapangan berjumlah 30 orang responden dengan cara melakukan wawancara.

Sehubungan dengan penelitian Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia dan pendidikan penjelasan lebih lanjut tentang identitas responden.

A.1 Identitas responden berdasarkan jenis kelamin

Dari penelitian Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan jenis kelamin adalah berikut ini:

Tabel V.I : Klasifikasi Responden Pegawai UPTD Perparkiran Menurut Jenis Kelamin

No.	Klasifikasi Responden	Jumlah Responden	Presentase %
1.	Laki-Laki	6	60%
2.	Perempuan	4	40%
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel V.I diatas dapat dilihat bahwa responden pegawai uptd perparkiran yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance adalah dominanya laki-laki dengan jumlah 6 orang (60%) dan jumlah responden pegawai UPTD Perparkiran perempuan berjumlah 4 orang (40%) dari total keseluruhan 10 orang responden yang berada di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Petugas Lapangan Menurut Jenis Kelamin

No.	Klasifikasi Responden	Jumlah Responden	Presentase %
1.	Laki-Laki	18	60%
2.	Perempuan	12	40%
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden petugas lapangan yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance adalah dominanya laki-laki dengan jumlah 18 orang (60%) dan jumlah responden perempuan dengan jumlah 12 orang (40%) dari total keseluruhan 30 orang terdapat koordinator (Pasar Sukaramai, Pasar Senapelan dan Pasar Bawah) laki-laki berjumlah 3 orang, juru parkir laki-laki berjumlah 11 orang dan juru parkir perempuan 1 orang sedangkan masyarakat laki-laki berjumlah 7 dan perempuan berjumlah 8 orang.

A.2 Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil penelitian Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia adalah berikut ini :

Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Pegawai UPTD Perparkiran Menurut Umur

No.	Klasifikasi Responden	Jumlah Responden	Presentase %
1.	20-30 Tahun	5	50%
2.	31-40 Tahun	2	20%
3.	41-50 Tahun	3	30%
4.	>50 Tahun	-	-
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel V.3 di atas dinyatakan bahwa responden dari Pegawai UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru baik dari kalangan bapak-bapak

dan ibu-ibu responden yang paling banyak usia 20-30 Tahun sebanyak 5 orang (50%) dan usia 31-40 Tahun sebanyak 2 orang (20%) sedangkan usia 41-50 Tahun sebanyak 3 orang (30%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak jumlah responden yang memiliki umur dalam penelitian ini adalah umur 20-30 Tahun, karena jika dilihat dari usia tersebut mereka memiliki kematangan dan tingkat konsistensi yang baik dalam melakukan pekerjaannya dan tentu sudah memiliki pengalaman yang bagus dalam bidangnya.

Tabel V.4 : Klasifikasi Responden Petugas Lapangan Menurut Umur

No.	Klasifikasi Responden	Jumlah Responden	Presentase %
1.	20-30 Tahun	9	30%
2.	31-40 Tahun	15	50%
3.	41-50 Tahun	5	16,6%
4.	>50 Tahun	1	3,4%
Jumlah		30	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel V.4 di atas dinyatakan bahwa responden dari Petugas Lapangan (Sukaramai, Pasar senapelan dan Pasar bawah) baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun sebanyak 15 orang (50%), usia 20-30 sebanyak 9 orang (30%) dan usia 41-50 Tahun sebanyak 5 orang (16,6%) sedangkan usia > 50 tahun sebanyak 1 orang (3,4%).

A.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil penelitian Analisis Kinerja UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance,

maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang pendidikan karena menurut penulis bahwa pendidikan sangat penting pendidikan tinggi akan berbeda dengan seseorang yang memiliki pendidikan yang rendah, untuk lebih jelasnya penulis akan paparkan berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel V.5 : Klasifikasi Responden Pegawai UPTD Perpustakaan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Klasifikasi Responden	Jumlah Responden	Presentase %
1.	SD	-	0%
2.	SMP	-	0%
3.	SMA	4	40%
4.	DIPLOMA	-	0
5.	SARJANA S1/S2	6	60%
Jumlah		10	100 %

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel V.5 diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Pegawai UPTD Perpustakaan adalah dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas Analisis Kinerja UPTD Perpustakaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance dominannya adalah Pendidikan Sarjana S1 sebanyak 6 orang (60%) dan Pendidikan SMA sebanyak 4 orang (40%). Hal ini dapat disimpulkan bahwa dominannya pegawai UPTD Perpustakaan memiliki minimal atau standar pendidikan yang paling rendah adalah SMA.

Tabel V.6 : Klasifikasi Responden Petugas Lapangan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Klasifikasi Responden	Jumlah Responden	Presentase %
1.	SD	-	0%
2.	SMP	10	33,4%
3.	SMA	10	33,4%
4.	DIPLOMA	5	16,6%
5.	SARJANA S1/S2	5	16,6%

Jumlah	30	100 %
---------------	-----------	--------------

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian, 2020

Dari tabel V.6 diatas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Pegawai UPTD Perparkiran adalah dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas Analisis Kinerja UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance dominannya adalah Pendidikan SMP sebanyak 10 orang (33,4%) ,Pendidikan SMA sebanyak 10 orang (33,4%), Pendidikan Diploma sebanyak 5 orang (16,6%) dan Pendidikan S1/S2 sebanyak 5 orang (16,6%).

B. Pembahasan Penelitian

B.1 Perencanaan Kerja

Dalam manajemen kinerja bahwa perencanaan adalah menjadi dari dasar dalam sebuah pelaksana kerja maka di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dengan Pendekatan Administratif Governance melaksanakan perencanaan, dimana perencanaan dilakukan dengan memperhatikan persoalan-persoalan SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman).

B. 1.1 Kekuatan

Aspek kekuatan yang menjadi pertimbangan perencanaan di UPTD Perparkiran yaitu tersedianya peraturan, sumber daya manusia dan sistem pemungutan.

Tabel V.7 : Surat Perintah Tugas Dalam Mengelola Perparkiran

NO	Surat Perintah Tugas Dalam Mengelola Perparkiran
1	Melaksanakan tugas pengelolaan parkir sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang lalu lintas dan angkutan jalan
2	Melakukan pemungutan retribusi parkir sesuai tarif yang telah diatur pada Peraturan Daerah kota No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat
3	Menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir setiap harinya kepada pembantu juru pungut untuk disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
4	Menjaga kelancara Arus Lalu Lintas serta membantu mewujudkan ketertiban,keamana dan kebersihan di Lokasi Parkir
5	Melengkapi atribut juru parkir berupa; karcis parkir, rompi parkir dan KTA Juru Parkir

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,2020

Berdasarkan tabel V.7 diatas dapat dijelaskan bahwa Surat Perintah Tugas dalam mengelola perparkiran sudah jelas peraturan untuk koordinator dan juru parkir di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPT Perparkiran pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai aspek kekuatan tersebut, ia mengatakan :

“Tersedianya peraturan berdasarkan peraturan daerah No 3 Tahun 2009 sudah berjalan dan terlaksana dengan semestinya karena pihak UPTD Perparkiran sudah memberikan tugas kepada koordinator lapangan sehingga retribusi parkir dikota pekanbaru terealisasi dengan baik dan jumlah petugas lapangan seperti koordinator dan juru parkir sudah cukup tetapi kalau ada titik baru pihak UPTD Perparkiran perlu penambahan juru parkir sedangkan sistem pemungutan parkir sudah aturannya seperti tupoksi koordinator, sanksi koordinator dan sistem pemungutan juru parkir sebagaimana koordinator menyerahkan uang hasil pungutannya 1x24 jam kepada bendahara penerima jadi sistem pemungutan sudah terlaksana dengan baik dan sesuai aturan.”

Dan mengenai aspek kekuatan penulis juga melakukan wawancara dengan

Ibu Dila Gusti Ayu,SH sebagai Staf Administrasi pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengatakan bahwa :

“Tersedianya peraturan berdasarkan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 di Kota Pekanbaru telah berjalan dengan baik dan pengawasannya tetap dijalankan sesuai dengan perda yang berlaku seperti adanya parkir legal atau illegal pengawasannya itu seperti apa dan tersedianya aturan bagaimana alur pemungutan retribusi parkir sehingga dengan adanya peraturan dalam pemungutan parkir terealisasi dengan baik dan petugas lapangan sudah cukup seperti tim pengawas, koordinator dan juru parkir tetapi kalau ada titik baru pihak UPTD Perparkiran perlu penambahan petugas lapangan sedangkan sistem pemungutan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur seperti juru parkir menyerahkan pungutan retribusi ke koordinator dan dari koordinator menyerahkan pungutan retribusi parkir ke pihak UPTD Perparkiran setiap 1x24 jam sehingga sistem pemungutan dalam mengelola parkir sudah terlaksana sesuai peraturan.”

Untuk lebih jelasnya memastikan hasil wawancara yang dilakukan tentang aspek kekuatan UPTD Perparkiran dilakukan juga wawancara dengan Bapak Marpaung sebagai koordinator di wilayah pasar sukaramai pada tanggal 27 Desember 2020, ia mengatakan bahwa :

“Pihak koordinator tugasnya yaitu menertibkan juru parkir yang tidak taat pada peraturan sesuai dengan peraturan yang ada, terutama pihak koordinator akan bertindak dilapangan dan bertanggungjawab atas tidak sesuai dengan peraturan sehingga juru parkir akan diberikan sanksi sesuai peraturan dan menyerahkan hasil pungutan parkir dari juru parkir ke koordinator dan dari koordinator ke UPTD Perparkiran itu 1x24jam.”

Dilakukan juga wawancara dengan Bapak Doni Chandra sebagai koordinator di wilayah pasar senapelan pada tanggal 27 Desember 2020, ia mengatakan bahwa :

“Koordinator tugasnya menertibkan juru parkir yang tidak taat pada peraturan sesuai dengan peraturan daerah No 3 Tahun 2009 Tentang Parkir Retribusi Parkir, pihak koordinator bertanggungjawab atas tidak sesuai dengan aturan yang diberikan pemerintah dan petugas parkir sudah cukup dilapangan sedangkan menyerahkan hasil pungutan Retribusi Parkir 1x24jam.

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang penulis lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa perencanaan dalam aspek kekuatan dalam Peraturan Daerah No 3 Tahun 2009 Tentang Parkir Retribusi Parkir tersedianya hukum yang jelas, adanya petugas lapangan dalam memungut retribusi yang cukup di pasar sukaramai, pasar senapelan dan pasar bawah dan sistem pemungutan retribusi yang jelas.

B.1.2 Kelemahan

Aspek kelemahan yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan di UPTD Perparkiran yaitu rendahnya ketaatan peraturan dan transparansi.

Tabel V.8: Pelanggaran Dalam Mengelola Parkir Sesuai Peraturan

No	Pelanggaran Dalam Mengelola Parkir
1.	Juru parkir tidak melengkapi atribut berupa karcis parkir,rompi parkir dan KTA juru parkir;
2.	Juru parkir memungut retribusi parkir melebihi tarif yang sudah tertera pada karcis retribusi parkir;
3.	Koordinator wajib tidak menyerahkan hasil pungutan dalam waktu 1x24 jam dan jumlah yang telah ditentukan;

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,2020

Berdasarkan tabel V.8 diatas dapat dijelaskan bahwa pelanggaran dalam mengelola parkir sudah ada aturannya didalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru dan ada Peraturan di Surat Perintah Tugas Koordinator. Sehingga sanksi yang diberikan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel V.9: Sanksi Yang Diberikan Apabila Melanggar Peraturan

No	Sanksi Yang Diberikan Apabila Melanggar Peraturan
1	Diberi teguran;
2	Dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak banyaknya Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
3	Pemberhentian langsung;

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,2020

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPTD Perparkiran pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai aspek kelemahan tersebut,ia mengatakan :

“Aspek kelemahannya seperti ketaatan peraturannya itu rendah seperti masyarakat melaporkan juru parkir ada yang tidak memakai atribut, tidak memberikan karcis dan ada yang memberikan setoran tidak tepat waktu tidak sesuai aturan pihak UPTD Perparkiran mengawasi apabila ada yang tidak taat dengan Standar Operasional Prosedur akan diberikan sanksi dan ketika ada masyarakat melaporkan juru parkir meminta tidak sesuai dengan karcis maka tim TNI dan Polri langsung turun kelapangan dan sedangkan dalam pelaporan seperti pendapatannya, juru parkir mendapat satu hari Rp.100.000,00 tetapi juru parkir mengatakan hasil pemungutan parkir mendapatkan hanya Rp.40.000,00 pihak UPTD Perparkiran sudah memberikan tarif kesetiap koordinator parkir, jadi koodinator yang bertanggungjawab hasil pemungutan parkir”.

Mengenai aspek kelemahan penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ade Budhi,S.Sos sebagai Pengawas Regu I pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengatakan bahwa :

“Faktor kelemahannya dalam mengelola perparkiran aturan yang tersedia tidak ditaati seperti adanya juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada masyarakat padahal itu sudah ada aturan dan ada juru parkir yang tidak memakai atribut dalam aturan itu sudah ada, karena juru parkir wajib memakai atribut sehingga bisa dibedakan mana juru parkir legal dan illegal, Tim pengawas bertindak apabila juru parkir melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan diberikan sanksi berupa teguran atau pemberhentian, Tim pengawas melakukan 3 kali sehari dari jam 08:00 WIB- 22:00 WIB.”

Untuk lebih jelasnya memastikan hasil wawancara di UPTD Perparkiran dilakukan juga wawancara dengan Bapak Mawardi sebagai juru parkir di pasar senapelan pada tanggal 27 Desember 2020, ia mengatakan:

“Peraturan memang wajib memakai atribut tetapi juru parkir tidak memakainya karena rompinya kusam karena juru parkir memakainya setiap hari sedangkan pemerintah memberikan rompi hanya sekali setahun ini perlu pemerintah tahu kenapa juru parkir tidak memakainya, adapun kedatangan sama tim pengawas itu hanya diberikan teguran, tidak ada diberikan sanksi yang berat dan masalah tidak memberikan karcis karena ada masyarakat yang tidak mau menerima karcis makanya juru parkir kadang tidak memberikan karcis kepada masyarakat, dan ada kesempatan buat juru parkir meminta Rp.2000,00 pemerintah tidak ada memberikan sanksi kepada juru parkir yang meminta tidak sesuai tarif yang telah ditentukan dan sedangkan Pemerintah sudah memberikan target parkir ke juru parkir setiap harinya, misalnya satu hari Rp.80.000,00 juru parkir wajib menyetorkan sesuai yang ditentukan, tidak bisa juru parkir sewenang-wenangnya memberikan uang berapa yang didapatkan, harus menyetorkan sesuai yang telah ditentukan oleh pemerintah dan apabila ada kendala cuaca juru parkir melaporkan kekoordinator.”

Selanjutnya penulis juga melakukan observasi mengenai kelemahan dan turun lapangan langsung mewawancarai dengan ibu Eflita sebagai masyarakat pada tanggal 28 Desember 2020 yang parkir dikawasan sukaramai yang membayar parkir, ia mengatakan bahwa :

“ Juru parkir tidak memberikan karcis dan meminta tarif parkir tidak sesuai dari pemerintah, misalnya parkir kendaraan roda dua diminta Rp.2000,00 sedangkan dipalang-palang pemerintah mengatakan tarif parkir Rp.1000,00 untuk kendaraan bermotor roda dua, hal ini perlu diperbaiki lagi karena juru parkir sewenangnyanya meminta tidak sesuai tarif retribusi parkir.”

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa aspek kelemahan seperti Juru parkir yang tidak menaati peraturan tentang atribut karena masalahnya pemerintah memberikan atribut itu hanya sekali setahun sedangkan juru parkir memakainya

setiap hari dan juru parkir yang tidak memberikan karcis karena kebanyakan masyarakat tidak mau menerimanya sedangkan pemerintah tidak tegas atau tidak dilaksanakan terhadap sanksi yang dibuat apabila juru parkir melanggarnya oleh karena itu juru parkir kebanyakan tidak menaati peraturan dan sedangkan persoalan pelaporan hasil pemungutan parkir benar-benar dilaporkan karena pihak koordinator ke pihak uptd perpustakaan melaporkan apabila target tidak tercapai karena alasannya terjadi perubahan cuaca atau ada hambatan dilapangan.

B.1.3 Peluang

Aspek peluang yang menjadi pertimbangan perencanaan di UPTD Perpustakaan yaitu perkembangan usaha dan koordinasi antar instansi terkait.

Tabel V.10: Data Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru

Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru				
No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2018	559.917,00	531.171,00	1.091.088,00
2	2019	573.206,00	544.153,00	1.117.369,00
3	2020	586.299,00	557.060,00	1.143.359,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2020

Berdasarkan data tabel V.10 diatas dapat dilihat dari data jumlah Pertumbuhan penduduk dikota pekanbaru yang cukup signifikan yaitu terhadap mempengaruhi aktivitas-aktivitas berbagai ekonomi untuk menjadi peluang untuk permasalahan perpustakaan atau kesempatan untuk merealisasikan target parkir atau retribusi parkir terealisasikan.

Tabel V. 11: Data Jenis Kendaraan dan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Pekanbaru

No	Jenis Kendaraan	Jumlah Kendaraan
1	Jumlah Kendaraan Bermotor-Mobil	150.035
2	Jumlah Kendaraan Bermotor-Bus	2.201
3	Jumlah Kendaraan Bermotor-Truk	59.139
4	Jumlah Kendaraan Bermotor-Sepeda motor	559.461
5	Jumlah Kendaraan Bermotor	770.836

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru,2020

Berdasarkan data tabel V.11 diatas dapat dilihat dari Badan Pusat Statistik Tahun 2020 jumlah kendaraan terbanyak di Provinsi Riau yaitu di Kota Pekanbaru dengan bertambahnya kendaraan di Kota Pekanbaru maka ada peluang atau kesempatan untuk merealisasikan target parkir.

Tabel V.12: Standar Operasional Prosedur Koordinator Parkir

NO	SOP Koordinator Parkir
1	Mengajukan permohonan pengelolaan area parkir kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;
2	Mengambil uang setoran retribusi parkir dan juru parkir;
3	Mengawasi pelaksanaan tugas juru parkir;
4	Menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perparkiran yang disetujui;
5	Menyetorkan setoran retribusi parkir kepada bendahara penerima UPTD;
6	Melaporkan kendala/hambatan yang dihadapi dilapangan kepada UPTD Perparkiran ;

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,2020

Berdasarkan data tabel V.12 diatas dapat dilihat dengan tersedianya peraturan Standar Operasional Prosedur Koordinator dalam mengelola parkir dapat berjalan dengan baik karena koordinator yang mengatur dilapangan seperti mengawasi pelaksanaan tugas juru parkir dan memungut retribusi parkir dari juru parkir.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPT Perparkiran pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai aspek peluang,ia mengatakan bahwa :

“Faktor yang menguntungkan dengan perkembangan usaha seperti bertambahnya kendaraan, bertambahnya ruko-ruko dan bertambahnya penduduk maka target parkir dapat terealisasi maka tim pengawas atau koordinator melakukan atau mencari titik-titik yang baru agar ada peluang atau kesempatan untuk memungut target parkir dan sedangkan dengan melibatkan koordinator maka pengelolaan parkir pengelolaan parkir berjalan dengan baik karena koodinator yang mengatur semua juru parkir jadi pihak UPTD Perparkiran menerima hasil pungutan dari koordinator.”

Mengenai masalah aspek peluang penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Dila Gusti Ayu,SH sebagai Staf Administrasi pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengatakan bahwa :

“Perkembangan usaha seperti bertambahnya ruko-ruko atau bertambahnya lahan parkir maka bertambahnya target retribusi parkir tetapi bertambahnya ruko-ruko atau lahan parkir BAPENDA akan menaiki target parkir setiap tahunnya dan sedangkan Pihak UPTD Perparkiran melibatkan koordinator maka target parkir terealisasi karena koordinator yang mengatur lapangan tetapi pihak UPTD Perparkiran menerima laporan dari koordinator misalnya satu hari tidak tercapai target parkir yang sudah diberikan misalnya karena hujan maka pihak UPTD Perparkiran akan melihat kondisinya, sehingga karena melibatkan koordinator lapangan pengelolaan parkir terlaksana dengan baik.”

Selanjutnya penulis juga melakukan observasi mengenai peluang turun kelapangan langsung mewawancarai Bapak Marpaung sebagai koordinator di pasar sukaramai pada tanggal 27 Desember 2020 yang memungut retribusi parkir,ia mengatakan bahwa :

“ Koordinator tugasnya menjalankan apa yang diberikan tugas oleh pihak UPTD Perparkiran, misalnya dari menargetkan parkir diwilayah sukaramai target nya satu hari Rp.4.000.000 jadi koordinator

menargetkan kejuru parkir berdasarkan wilayah nya besar atau kecilnya dan koordinator yang mengatur juru parkir.”

Dilakukan juga wawancara dengan Bapak Doni Chandra sebagai koordinator di wilayah pasar senapelan pada tanggal 27 Desember 2020, ia mengatakan bahwa :

“Koordinator tugasnya menjalankan tugas apa yang diberikan tugas oleh pihak UPTD Perparkiran dan sudah ditentukan target diwilayah pasar senapelan atau sesuai wilayah masing-masing tergantung luasnya lahan parkir.”

Jika dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa aspek peluang dalam perencanaan seperti bertambahnya ruko-ruko atau lahan parkir dan bertambahnya kendaraan maka dapat terealisasikan target parkir atau dapat tercapai target parkir setiap tahunnya. Dilihat badan pusat statistik jumlah kendaraan dikota pekanbaru terus bertambah maka target parkir setiap tahunnya akan meningkat tetapi pemerintah terus menaiki target retribusi parkir jika bertambahnya lahan parkir dan sedangkan koordinator mengelola parkir terlaksana dengan baik karena kordinator tugasnya mengatur lapangan dan memungut parkir setiap juru parkir maka dengan adanya koordinator dalam mengelola parkir terlaksana dengan baik.

B.1.4 Ancaman

Aspek tantangan yang menjadi pertimbangan perencanaan di UPTD Perparkiran yaitu Keberadaan Parkir liar dan Perubahan Cuaca.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPTD Perparkiran pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai Ancaman:

“Parkir liar atau illegal membuat target parkir turun atau pemasukan berkurang dengan banyaknya parkir liar pihak UPTD Perparkiran akan mengawasi setiap harinya, jika kepadatan parkir illegal pihak UPTD Perparkiran akan memberikan sanksi kepada parkir illegal dan membedakan parkir illegal bisa dilihat dari atributnya misalnya tidak memakai rompi atau memberikan karcis kepada masyarakat yang parkir diwilayah badan jalan dan sedangkan perubahan cuaca seperti kabut asap, hujan dan wabah covid 19 sangat turun pendapatan retribusi parkir contoh nya wabah covid 19 kemaren dilockdown jadi pencapaian target turun seperti tahun 2020 tidak mencapai 50% karena masyarakat tidak ada bepergian sehingga target parkir tidak dapat direalisasikan.”

Mengenai aspek Ancaman penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Dila Gusti Ayu, SH sebagai Staf Administrasi pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengatakan bahwa :

“Parkir liar atau illegal memang sangat tidak menguntungkan,karena parkir liar tersebut menguntungkan diri sendiri tetapi pihak UPTD Perparkiran mengawasi setiap hari kalau juru parkir mengenakan atribut berarti itu juru parkir resmi, kalau tidak mengenakan atribut maka itu juru parkir liar dan sedangkan perubahan cuaca memang membuat target parkir turun seperti kabut asap, hujan terus menerus dan sekarang wabah covid 19, target parkir tidak terealisasikan yang pertama karena perubahan cuaca.”

Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa aspek ancaman atau tantangan dalam perencanaan di UPTD Perparkiran keberadaan parkir liar sangat mempengaruhi target parkir dan turun dratis sehingga tujuan mencapai retribusi parkir tidak terealisasikan karena dengan ada parkir liar untuk menguntungkan diri sendiri dan perubahan cuaca juga sangat mempengaruhi dengan target parkir sehingga tujuan mencapai

retribusi parkir tidak teralisasi setiap tahunnya karena dengan perubahan cuaca tidak mendukung maka pemasukan berkurang.

Dokumen perencanaan tidak ada karena dibidang perparkiran tidak membuat perencanaan langsung karena UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan hanya sebagai eksekutor sebagai pelaksanaan dari apa yang diberikan oleh BAPENDA, BAPENDA sudah menentukan target parkir ke Dinas Perhubungan bagian UPTD Perparkiran berdasarkan wawancara ketika meminta dokumennya tidak diberikan.

B.2 Pelaksana kerja

Pelaksanaan yaitu sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan maka di UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengelola perparkiran melaksanakan perencanaan, dimana pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan persoalan-persoalan Pelaksanaan Akuntabilitas, Transparansi dan *Value for money*.

B.2.1 Pelaksanaan Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2004:25) Prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran-anggaran tersebut

Untuk mengetahui lebih jelasnya akuntabilitas berdasarkan akuntabilitas kejujuran dan hukum dan akuntabilitas proses yang digunakan dalam mengelola perpustakaan di kota pekanbaru.

B.2.1.1 Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum (accountability for probity and legality)

Akuntabilitas kejujuran dan hukum dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (abuse of power) korupsi dan kolusi sedangkan akuntabilitas hukum (legal accountability) terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

Tabel V.13: Alur menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir

NO	Alur menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir
1	Juru parkir menyerahkan uang hasil pungutan 1x24 jam kepada koordinator parkir dengan ketetapan dan jumlah yang telah disepakati
2	Koordinator menyerahkan hasil pungutan dari juru parkir ke bendahara penerima UPTD Perpustakaan dalam waktu 1x24 jam dalam jumlah yang telah disepakati.

Berdasarkan tabel V.13 Alur menyerahkan hasil pungutan Retribusi Parkir sudah ada peraturannya, jumlah retribusi parkir yang sudah ditetapkan masing-masing oleh retribusi parkir kepada koordinator dan juru parkir dan koordinator menyerahkan hasil pungutan retribusi parkir dalam waktu 1x24 jam.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPT Perpustakaan pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai akuntabilitas kejujuran dan hukum:

“Didalam mengelola perpustakaan kepada koordinator parkir dan petugas parkir sudah diberikan tupoksi kerjanya masing-masing jadi pihak uptd

yakin itu sangat sulit kecenderungan untuk penyalahgunaan jabatan dan penyelewangan dana.”

Mengenai masalah perubahan cuaca penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Dila Gusti Ayu,SH sebagai Staf Administrasi pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengatakan bahwa :

“Koordinator parkir dan juru parkir sudah diberikan tupoksi kerjanya masing-masing misalnya dalam menyerahkan pemungutan parkir sudah ditentukan, jadi kalau dalam penyalahgunaan jabatan atau penyelewangan dana itu sangat sulit dilakukan kepada koordinator parkir atau juru parkir, tetapi kalau juru parkir meminta uang kendaraan bermotor roda dua Rp.2.000,00 kepada masyarakat Pihak UPTD Perparkiran akan memberikan sanksi apabila ada yang melaporkannya atau kedapatan dengan tim pengawas.”

Untuk lebih jelas mengenai masalah akuntabilitas kejujuran dan hukum penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Ibu Hatobi sebagai juru parkir di pasar sukaramai pada tanggal 27 Desember 2020, ia mengatakan bahwa:

“Target parkir sudah ditentukan kepada koordinator, misalnya dari pagi sampai siang targetnya Rp.80.000,00 tetapi kalau tidak tercapai dalam Rp.80.000,00 makanya kadang juru parkir meminta uang pemungutannya tidak sesuai dengan karcis tetapi kalau kedapatan sama tim pengawas memang akan diberikan sanksi”.

Dilakukan juga wawancara dengan Bapak Anton sebagai juru parkir di pasar bawah pada tanggal 27 Desember 2020, ia mengatakan bahwa:

“ Target parkir memang sudah ditentukan oleh koordinator, sesuai dengan karcis yang diberikan koordinator, misalnya karcis habis maka juru parkir tidak memberikan karcis atau memungut parkir tidak sesuai dengan peraturan.”

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan akuntabilitas kejujuran dan hukum didalam mengelola perparkiran kepada koordinator parkir dan petugas parkir sudah diberikan tupoksi kerjanya masing-masing, jadi itu

sangat sulit kecenderungan untuk penyalahgunaan jabatan dan penyelewangan dana karena sudah ditentukan target masing-masing tetapi juru parkir masih memungut retribusi parkir tidak sesuai prosedur hal ini pemerintah tidak tegas terhadap sanksi yang dibuat.

B.2.1.2 Akuntabilitas Proses (Administratif)

Akuntabilitas Proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur akuntansi. Akuntabilitas proses diwujudkan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPT Perpustakaan pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai akuntabilitas proses :

“Pengelolaan retribusi parkir sudah melalui proses Peraturan Perundang-Undangan menurut pihak UPTD Perpustakaan sudah sangat jelas dan sudah tertuang dalam Peraturan Daerah No.2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru seperti ketentuan wajib dipenuhi oleh seorang juru parkir,apabila juru parkir melanggar aturan diberikan sanksi atau teguran.”

Mengenai masalah akuntabilitas proses penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Dila Gusti Ayu, SH sebagai Staf Administrasi pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengatakan bahwa :

“Proses dalam mengelola retribusi parkir sudah ditentukan dalam Peraturan Daerah sehingga koordinator dan juru parkir melaksanakan sesuai aturan yang ada tetapi kalau ada kedapatan yang tidak sesuai prosedur maka diberikan sanksi dan denda.”

Untuk lebih jelasnya memastikan hasil wawancara yang dilakukan tentang akuntabilitas proses dalam mengelola parkir dinas perhubungan kota pekanbaru dilakukan juga wawancara Bapak M.Yatim sebagai juru parkir di pasar bawah pada tanggal 27 Desember 2020, ia mengatakan:

“Pemerintah sudah memberikan ketentuan sesuai undang-undang dalam mengelola parkir seperti melengkapi atribut dan memungut parkir setiap hari tetapi misalnya juru parkir melanggar sesuai prosedur tidak ada diberikan sanksi.”

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan akuntabilitas proses dari pihak UPTD Perparkiran sudah mengarahkan prosedur kepada petugas lapangan tetapi juru parkir melanggar prosedur yang telah ditetapkan karena pemerintah tidak tegas terhadap sanksi yang diberikan sehingga prosedur yang telah ditetapkan masih kurang dilaksanakan.

B.2.2 Transparansi

Nico Ardianto (2007: 21) Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni meliputi informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi

mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada preferensi publik.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, Keterbukaan terhadap informasi, Akses masyarakat terhadap anggaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang digunakan dalam mengelola perpajakan di kota Pekanbaru.

B.2.2.1 Keterbukaan terhadap informasi

Peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan transparansi, keterbukaan terhadap informasi yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggung jawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPT Perpajakan pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai Keterbukaan terhadap informasi :

“Informasi tentang perundang-undangan persoalan mengelola perpajakan itu hanya tentang Peraturan Daerah kota No 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat dan menentukan targetkan parkir adalah BAPENDA bukan dari UPTD Perpajakan, pihak UPTD Perpajakan hanya mengikuti rapat saja.”

Mengenai masalah kerangka kerja hukum bagi transparansi penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Dila Gusti Ayu,SH sebagai Staf Administrasi pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengatakan bahwa :

“Kalau tentang informasi mengenai mengelola perpajakan pihak UPTD Perpajakan tidak memberitahukan kepada masyarakat karena pihak UPTD Perpajakan hanya menjalankan tugas untuk memungut retribusi parkir dan pihak UPTD Perpajakan memberikan informasikan mengenai tarif parkir berapa disetiap palang jalan contohnya di sukaramai.”

Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan kerangka kerja hukum bagi

transparansi, mengenai mengelola parkir tidak ada diinformasikan kemasyarakat hanya yang diberitahukan tarif parkir sesuai undang-undang sedangkan perencanaan target parkir yang menentukan BAPENDA bukan dari UPTD Perparkiran.

B.2.2.2 Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran

Transparansi anggaran yaitu keterbukaan informasi tentang sektor keuangan publik. Transparansi anggaran mengacu pada sejauh mana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah (Andrianto,2007:21)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPT Perparkiran pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran :

“Informasi tentang anggaran pihak UPTD Perparkiran tidak memberikan informasi secara terbuka karena informasi anggaran itu yang tau hanya BAPENDA, memang tidak dipublikasikan atau diinformasikan.”

Mengenai masalah akses masyarakat terhadap transparansi anggaran penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu R.Fera Yulita, A,Md sebagai Staf Administrasi pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengatakan bahwa:

“Masyarakat tidak perlu tahu tentang target parkir atau informasi anggaran karena yang mengejar target itu UPTD Perparkiran bukan masyarakat.”

Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, masyarakat seharusnya memiliki hak dan akses untuk mengetahui proses anggaran atau perencanaan mengelola parkir tetapi memang tidak dipublikasikan dan tidak

ada keterbukaan akses terhadap menentukan anggaran atau anggaran yang dicapai.

B.2.2.3 Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran yaitu keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPTD Perpajakan pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan anggaran :

“Proses penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan itu hanya dari pihak Dinas Perhubungan dan BAPENDA jadi koordinator dan masyarakat tidak ada terlibat dalam proses anggaran retribusi parkir.”

Mengenai masalah akses masyarakat terhadap transparansi anggaran penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Dila Gusti Ayu,SH sebagai Staf Administrasi pada tanggal 23 Desember 2020 yang mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan menentukan target parkir pihak UPTD Perpajakan tidak ada melibatkan masyarakat sama sekali, yang menentukan anggaran BAPENDA bukan pihak UPTD Perpajakan.”

Untuk lebih jelasnya memastikan hasil wawancara di UPTD Perpajakan dilakukan juga wawancara dengan Bapak T.Marpaung sebagai koordinator pada tanggal 27 Desember 2020 yang memungut retribusi parkir,ia mengatakan bahwa:

“Perencanaan untuk menentukan target parkir koordinator tidak terlibat dalam keputusan karena koordinator hanya menjalankan tugas apa yang diberikan oleh pihak UPTD Perpajakan.”

Jika dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam

pengambilan keputusan anggaran tidak melibatkan koordinator dan masyarakat karena yang proses anggaran retribusi parkir hanya melibatkan Dinas Perhubungan dan BAPENDA.

B.2.3 Value for money

Value for money yaitu penghargaan terhadap uang, hal ini berarti setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. *Value for money* diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas.

Untuk mengetahui lebih jelasnya *Value for money* berdasarkan Ekonomi, Efisien dan Efektivitas yang digunakan dalam mengelola perparkiran di kota pekanbaru.

B.2.3.1 Ekonomi

Ekonomi merupakan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah.

Hasil wawancara yang diperoleh Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU UPTD Perparkiran pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai Ekonomi:

“Retribusi parkir untuk kendaraan roda dua hanya Rp.1.000,00 satu kali parkir dan kendaraan roda empat Rp.2.000,00 , tetapi tergantung masyarakat memberikannya berapa, karena sudah tertera dipalang atau dikarcis parkir untuk kendaraan roda dua Rp.1000,00. Dan kendaraan roda empat Rp.2.000,00”.

Mengenai masalah Ekonomi penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Yudi sebagai Masyarakat di Sukaramai pada tanggal 28 Desember 2020 yang mengatakan bahwa:

“Retribusi parkir untuk sepeda motor Rp.1.000,00 sedangkan juru parkir meminta Rp.2000,00 tidak sesuai dengan karcis atau himbau dari

pemerintah, tetapi kadang tidak ikhlas juru parkir menarif parkir tidak sesuai dengan peraturan karena ada juru parkir yang tidak mau membantu mengeluarkan sepeda motor atau tiba-tiba datang meminta retribusi parkir.”

Mengenai masalah Ekonomi penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Mirna sebagai Masyarakat di Senapelan pada tanggal 28 Desember 2020 yang mengatakan bahwa:

“Retribusi parkir untuk sepeda motor Rp.1.000,00 sedangkan juru parkir meminta Rp.2000,00 tidak sesuai dengan karcis atau himbau dari pemerintah tetapi kalau juru parkir menarif parkir tidak sesuai dengan peraturan tidak apa-apa bagi saya mungkin juru parkir tidak mencukupi target parkirnya tetapi juru parkir tidak membantu untuk merapikan sepeda motor saya.”

Penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Tika sebagai Masyarakat di Pasar Bawah pada tanggal 28 Desember 2020 yang mengatakan bahwa:

“Dengan memberikan uang Retribusi parkir untuk sepeda motor Rp.2.000,00 tidak sesuai karcis saya ikhlas saja tetapi pemerintah harus mengawasi parkir yang tidak taat peraturan karena kebanyakan masyarakat ngeluh terhadap tarif parkir tidak sesuai peraturan.”

Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Ekonomi jumlah dan kualitas terhadap memungut retribusi parkir tidak ada nilainya karena juru parkir memungut tarif parkir tidak sesuai peraturan dan juru parkir hanya memungut uang saja tidak membantu masyarakat mengeluarkan sepeda motor sehingga juru parkir tidak menghargai uang yang diberikan masyarakat.

B.2.3.2 Efisiensi

Efisiensi merupakan penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna).

Hasil wawancara yang diperoleh Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU

UPTD Perparkiran pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai Efisiensi:

“Perencanaan dalam memungut retribusi parkir sesuai dengan peraturan apa yang diharapkan dalam memungut retribusi parkir untuk terealisasikan retribusi parkir”.

Mengenai masalah Efektivitas penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Mirna sebagai Masyarakat di Senapelan pada tanggal 28 Desember 2020 yang mengatakan bahwa:

“ Juru parkir tidak mematuhi aturan seperti tidak memakai atribut, tidak memberikan karcis dan pungutan parkir tidak sesuai tarif dan tidak ada sanksi yang diberikan kepada juru parkir, karena selama ini juru parkir tidak pernah mematuhi aturan.”

Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Efisiensi pihak UPTD Perparkiran merencanakan dalam mengelola perparkiran agar tujuan mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi juru parkir melanggar apa yang diberikan oleh Pihak UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

B.2.3.3 Efektivitas

Efektivitas merupakan penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Hasil wawancara yang diperoleh Bapak M.Nasir,SH sebagai Kasubbag.TU

UPTD Perparkiran pada tanggal 23 Desember 2020 mengenai Efektivitas:

“Kalau dari pelaksanaan memungut retribusi parkir sudah tercapai karena koordinator dan juru parkir mematuhi peraturan yang sudah diberikan dan Target retribusi parkir yang telah ditetapkan belum tercapai atau belum terealisasikan karena perubahan cuaca sangat mempengaruhi target parkir”.

Mengenai masalah Efektivitas penulis juga melakukan wawancara dengan Ibu Mirna sebagai Masyarakat di Senapelan pada tanggal 28 Desember 2020 yang mengatakan bahwa:

“Memungut retribusi parkir dilihat dari juru parkir tidak sesuai dengan peraturan padahal pemerintah sudah memberikan karcis, memberikan atribut dan memungut retribusi sesuai peraturan tetapi juru parkir memungut retribusi parkir tidak sesuai aturan.”

Jika dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Efektivitas suatu kegiatan yang telah ditetapkan belum tercapai tujuannya karena juru parkir memungut retribusi tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

C. Temuan-temuan diluar dari variabel-variabel penelitian yang saat ini dilakukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Perparkiran

Salah satu temuan dalam mengelola perpajakan sekarang sedang di uji coba perparkiran untuk melibatkan pihak ketiga supaya pemungutan perparkiran lebih efektif. Salah satu upaya untuk mengefektifitas dalam mengelola perparkiran itu mengandeng pihak ketiga yaitu PT.Datama yang saat ini dilakukan proses uji coba pada saat penelitian ini dilakukan. Proses uji coba PT.Datama dilakukan selama dua bulan terhitung sejak awal januari dan februari akhir. Karena PT.Datama menang tender dari beberapa PT yang mengikutinya. Pihak ketiga pemenang lelang ini bakal melakukan pengelolaan parkir hingga lima tahun kedepan. Sesuai kesepakatan dan ketetapan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan PT. Datama dari potensi retribusi parkir Rp36.000.000.000,00 pihak PT. Datama wajib menyetorkan kepada Dishub Kota Pekanbaru sebesar 30%. Dengan uji coba mengelola perparkiran ini ada imbasnya terhadap permasalahan

perparkiran dan nanti nya ada imbasnya kemasyakat. Karena juru parkir tidak sanggup dengan target yang ditentukan karena terlalu tinggi yang biasanya Rp.70.000,00 menjadi Rp.100.000,00, dan juru parkir meminta parkir kemasyarakat tidak sesuai peraturan yaitu misalnya motor roda dua Rp.1.000,00 tetapi juru parkir meminta Rp.2.000,00.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian lapangan lapangan dan dianalisis serta dilengkapi dengan pembahasan pada hasil penelitian ini. Maka penulis memberikan kesimpulan secara perindikator yang menjadi tolak ukur penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk indikator Kekuatan dimana item ini memiliki item penilaian sebanyak 3 item yaitu tersedianya peraturan, sumber daya dan sistem pemungutan dapat disimpulkan bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Parkir Retribusi Parkir tersedianya hukum yang jelas, adanya petugas lapangan dalam memungut retribusi yang cukup di pasar sukaramai, pasar senapelan dan pasar bawah dan sistem pemungutan retribusi yang jelas.
2. Untuk indikator Kelemahan dimana item penilaian sebanyak 2 item yaitu rendahnya ketaatan peraturan dan transparansi dapat disimpulkan bahwa juru parkir kurang menaati peraturan yang diberikan pemerintah seperti tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis hal ini pemerintah perlu tegas terhadap sanksi yang diberikan sedangkan pelaporan hasil pemungutan parkir itu benar-benar dilaporkan karena pihak UPTD Perparkiran sudah menentukan target nya masing-masing.
3. Untuk indikator Peluang dimana item penilaian sebanyak 2 item yaitu perkembangan usaha dan koordinasi antar instansi terkait dapat

disimpulkan bahwa perkembangan usaha dengan bertambahnya ruko-ruko atau lahan parkir dan bertambahnya kendaraan setiap tahunnya target parkir dapat tercapai tetapi pemerintah terus menaiki target parkir jika bertambahnya lahan parkir sedangkan terkaitnya koordinator mengelola parkir terlaksana dengan baik karena koordinator yang mengatur dilapangan dan memunggut setiap juru parkir.

4. Untuk indikator Ancaman dimana item penilaian sebanyak 2 item yaitu keberadaan parkir liar dan kondisi cuaca dapat disimpulkan bahwa kondisi cuaca seperti hujan,kabut asap dan wabah covid 19 mempengaruhi turunnya target parkir karena dengan perubahan cuaca masyarakat tidak ada bepergian dan adanya parkir liar atau illegal hal ini mengutungkan dirinya sendiri sehingga pemasukan nya tidak masuk dalam retribusi parkir.
5. Untuk indikator Akuntabilitas dimana item penilaian sebanyak 2 item yaitu akuntabilitias kejujuran dan hukum dan akuntabilitas proses dapat disimpulkan bahwa koordinator dan juru parkir sudah diberikan tupoksi kerjanya masing-masing jadi itu sangat sulit kecenderungan untuk penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan dana karena sudah ditentukan target masing-masing tetapi juru parkir masih memungut retribusi parkir tidak sesuai prosedur padahal pihak UPTD Perparkiran sudah mengarahkan proesdur kepada petugas lapangan tetapi petugas lapangan melanggar prosedur yang telah ditetapkan hal ini pemerintah tidak tegas terhadap sanksi yang dibuat.

6. Untuk indikator Transparansi dimana item penilaian sebanyak 3 item yaitu kerangka kerja hukum transparansi, akses masyarakat terhadap anggaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa pelaporan mengenai mengelola parkir tidak ada diinformasikan kepada masyarakat hanya yang diinformasikan kemasyarakat yaitu tarif parkir sesuai undang-undang sedangkan perencanaan target parkir yang menentukan BAPENDA bukan dari Pihak UPTD Perparkiran dan tidak ada terlibatnya koordinator dan masyarakat pengambilan keputusan terhadap anggaran yang ditentukan. Hal ini dapat terjadinya penyelewengan dana atau anggaran.
7. Untuk indikator *Value for money* dimana item penilaian sebanyak 3 item yaitu ekonomi, efisien dan efektivitas dapat disimpulkan bahwa yaitu Kualitas terhadap memungut retribusi parkir tidak ada nilainya karena juru parkir memungut tarif parkir tidak sesuai peraturan dan juru parkir hanya memungut uang saja tidak membantu masyarakat mengeluarkan sepeda motor sehingga juru parkir tidak menghargai uang yang diberikan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas maka penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat dan pembaca skripsi ini. Saran yang penulis berikan kepada pihak diatas adalah :

- a. Hendaknya pihak UPTD Perparkiran dalam mengelola perparkiran membuat perencanaan dan pelaksanaan lebih matang sehingga target parkir terealisasi.
- b. Hendaknya pihak UPTD Perparkiran tegas dalam peraturan yang tersedia agar petugas lapangan menaati peraturan karena petugas parkir meminta tarif parkir tidak sesuai peraturan.
- c. Kepada juru parkir agar mematuhi peraturan dan memungut uang parkir sesuai peraturan karena dalam peraturan ada sanksi bagi yang melanggar peraturan.
- d. Seharusnya pemerintah transparansi terhadap perencanaan dan proses mengelola perparkiran atau melibatkan masyarakat terhadap target anggaran karena agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam mengelola perparkiran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Armstrong, M. and Baron, A. 1998. *Performance Management – The New Realities*. London : Institute of Personnel and Development

Ambar T. Sulistiyani Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Konsep, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Bacal, Robert. 1999. *Performance Management*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Chaizi, Nasucha. 2004, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo.

Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.

Irham Fahmi, 20015, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*, Bandung : Alfabeta

Kasmir. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller (2009), *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13. Jakarta.

Mahmudi, S.E., M.Si., AK, 2005, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

Mahmudi, 2015, *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta : BPFE.

- Mardiasmo,2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.
- Maksudi, Beddy Iriawan , 2017. *Dasar- Dasar Administrasi Publik* , Depok : PT. Grafindo Persada.
- Miles,Matthew B dan A.Michael Huberman, 1992.*Analisis Data Kualitatif*,Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moheriono,2012.*Pengukuran Kinerja Berbasis / Kompetensi* : Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rangkuti,Freddy.2006. *Analisis SWOT teknik membedah kasus bisnis* : Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum
- Sinambela,Lijan Poltak,2012. *Kinerja Pegawai : Teori Pengukuran dan Implikas*, Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Siagian.Sondang P.2008.*Manajemen Stratejik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono, 2012. *Memahami penlitian Kualitatif* . Bandung : PT Alfabeta.
- Sugiyono, 2016. *Memahami penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : PT Alfabeta
- Tripomo, Tedjo dan Udan,2005.*Manajemen Strategi*. Bandung : Rekayasa Sains.
- Wibowo,2008. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, 2011. *Manajemen Kinerja Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli, 2009. *Fungsi – fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*,Pekanbaru:UIR Press.

Zulkifli,2013.*Buku Pedoman Penulisan UP,Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*,Pekanbaru: Badan Penerbit Fisipol UIR

Dokumen :

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat.

Media Internet :

<https://dishub.riau.go.id/>

<https://pekanbaru.go.id/d/perda/10092018/31451-PERWA-NO-106-TH-2016.pdf>

<https://suarapekanbaru.com/news/cetak/518/rapor-merah-kinerja-dishub-pekanbaru-terburuk-yuliarso--bukan-zaman-saya>